

Hasil Pemeriksaan BPK
Semester II 2018

Hal 4

Rakor untuk Tingkatkan Sinergi

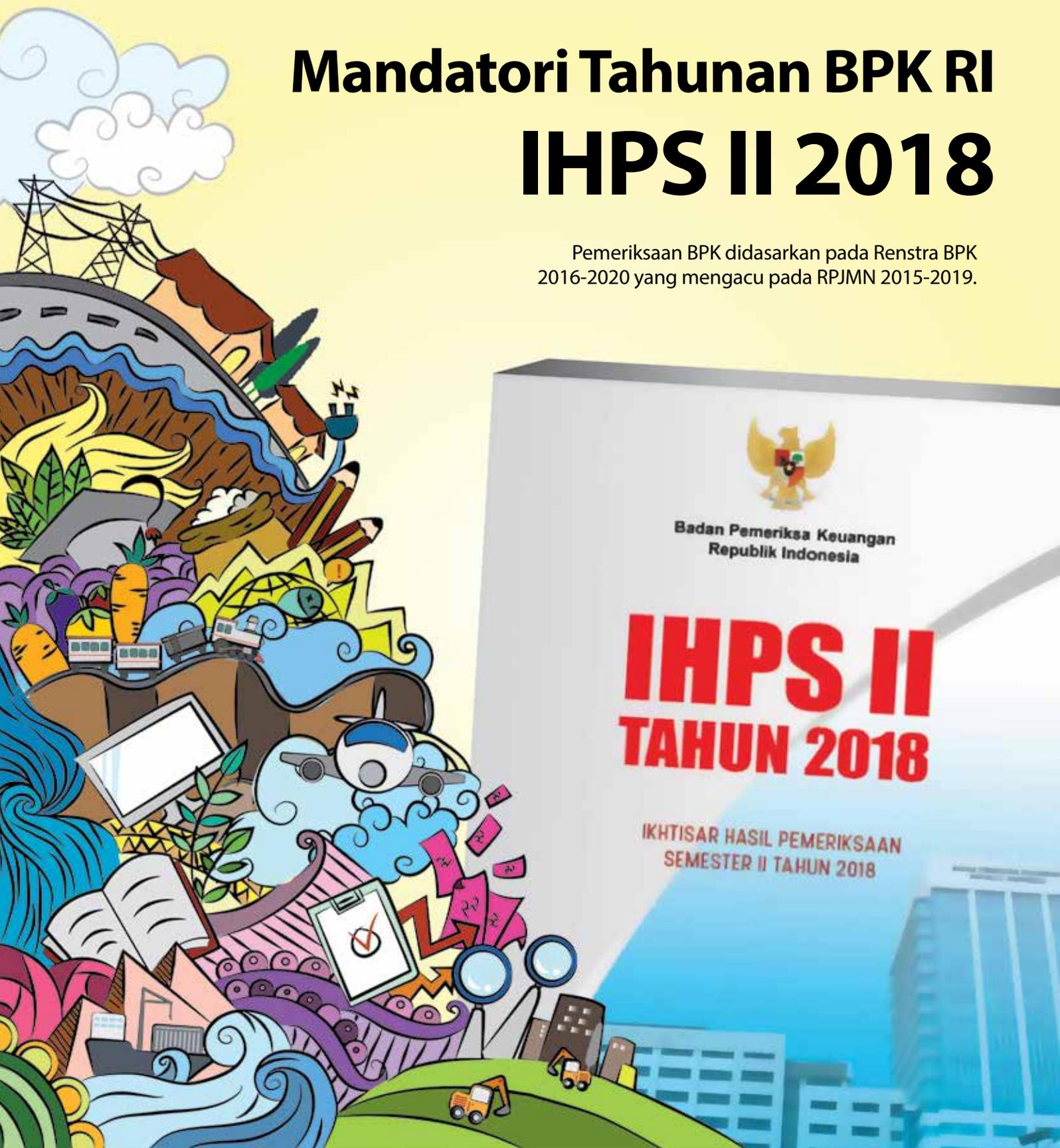
Hal 40

BPK Pertajam Renstra

Hal 43

Mandatori Tahunan BPK RI IHPS II 2018

Pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK
2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019.



- 3 Dari Redaksi
- 4 Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2018
- 8 Yang Spesial dari IHPS II 2018
- 10 Dari Siber hingga Revaluasi Aset
- 18 BPK Mantapkan Kiprah di Kancah Internasional
- 20 Isma Yatun, Anggota V BPK,
Terus Belajar dan Silaturahmi
- 24 I Nyoman Suwirta, Bupati Klungkung, Bali,
Berani Melakukan Diskresi
- 28 Novy Gregory Antonius Pelenkahu, Staf Ahli
BPK Bidang BUMN/BUMD dan Kekayaan
Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya,
Pemeriksa Harus Rajin Membaca
- 32 Menaklukkan Sungai Mahakam
- 35 Mengubah Hobi Jadi Mesin Penghasil Rupiah
- 38 Melestarikan Kesenian Karawitan



- 40 Rakor untuk Tingkatkan Sinergi
- 42 Mengurangi Tuntutan Hukum Terhadap BPK
- 43 BPK Pertajam Renstra
- 44 BPK Dorong Literasi dengan Bedah Buku
- 45 Penerapan Prinsip Pengungkapan Penuh
(*Full Disclosure*)
Akun Piutang Pajak pada LKPP TA 2017
- 48 Berita Foto



Edisi kali ini merupakan edisi yang istimewa, khususnya bagi para perempuan di seluruh Tanah Air. Karena edisi ini bertepatan dengan peringatan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Sesuai dengan semangat yang telah ditunjukkan oleh RA Kartini, edisi *Warta Pemeriksa* pun memberikan sentuhan khusus untuk para pembaca perempuan.

Yang istimewa adalah wawancara redaksi dengan Anggota V BPK Isma Yatun. Pada rubrik khusus yang dinamai *Srikandi BPK*, Isma bercerita banyak mengenai perjalanan kariernya yang dimulai dari sektor perbankan, dunia politik, hingga akhirnya bisa mencatatkan sejarah dengan menjadi Anggota BPK perempuan pertama.

Pada wawancara itu, Isma juga bercerita mengenai pandangannya terkait sosok Kartini pada era saat ini. Termasuk juga mengenai kunci bagi perempuan untuk dapat berkompetisi dan berkarier.

Di rubrik utama, *Warta Pemeriksa* kali ini menyajikan informasi mengenai beberapa isu penting yang diangkat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2018. IHPS kali ini memuat ikhtisar atas 89 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri atas 2 hasil pemeriksaan keuangan, 29 hasil pemeriksaan kinerja, dan 58 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat yang dihasilkan BPK terdiri atas 8 tema dalam Renstra BPK 2016-2020, yaitu perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan mental dan karakter, ketersediaan pangan, pembangunan kewilayahan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi. Secara keseluruhan, pemeriksaan kinerja mengungkapkan 344 temuan yang memuat 405 permasalahan senilai Rp698,65 miliar.

Pada rubrik Sudut Pandang, redaksi berkunjung ke kantor Bupati Klungkung, Bali, beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu, kami berbincang langsung dengan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengenai dana desa.

Informasi yang menarik mengenai Klungkung adalah bagaimana upaya pemerintah kabupaten untuk melakukan diskresi dalam mengelola anggaran dana desa. Dengan begitu, program-program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas masyarakat dapat dijalankan.

Di rubrik Perjalanan, redaksi menyajikan informasi mengenai pengalaman pemeriksa BPK di Kabupaten Mahakam Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur. Para pemeriksa harus berjuang untuk dapat menaklukkan Sungai Mahakam untuk dapat melakukan pekerjaannya. Ini pun dengan infrastruktur yang masih sangat terbatas.

Masih banyak informasi lain yang kami sajikan pada edisi kali ini. Redaksi juga mengingatkan kepada pembaca yang budiman agar memanfaatkan momentum pemilu dengan baik pada 17 April 2019. Yaitu dengan menggunakan hak pilihnya dan bersama-sama menjaga agar pesta demokrasi lima tahunan kali ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. ●

Tim Editorial

Pengarah

Moermahadi Soerja Djanegara
Bahrullah Akbar
Bahtiar Arif

Penanggung Jawab

Juska Meidy Enyke Sjam

Supervisi Penerbitan

Gunarwanto

Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

Redaksi

Bidramnanta
Iqra Fiqh
Yudha Bayangkara
Radiansyah Said
Arif Rahman Hakim
Ren Jingga

Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

Sekretariat

Bestantia Indraswati
Klara Ransingin
Reza Hadi Satria
Ridha Sukma
Sudarman

Sekretariat

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Faksimili: 021-57854096
Email: wartabpkri@gmail.com
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh:
Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2018

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, entitas yang diperiksa pada saat pemeriksaan selama Semester II Tahun 2018, telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp393,56 miliar (8 persen).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018. Sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, IHPS disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

IHPS II 2018 terdiri atas 2 LHP keuangan, 244 LHP kinerja, dan 250 LHP dengan tujuan tertentu (DTT). Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 2 LKPHLN (Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri) Tahun 2017. Terkait pemeriksaan kinerja, BPK mengungkapkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program/kegiatan. Sementara, hasil pemeriksaan DTT memuat kesimpulan secara umum bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 177 (71 persen) dari 250 objek pemeriksaan.

Dalam ikhtisar ini diuraikan temuan BPK yang mencapai 4.376 dengan jumlah permasalahan sebanyak 6.076. Ribuan permasalahan tersebut meliputi 1.203 (20 persen) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern

(SPI) dan 2.161 (35 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp4,79 triliun. Selain itu, BPK menemukan 2.712 (45 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,50 triliun.

Dari 2.161 permasalahan ketidakpatuhan, sebanyak 1.600 (74 persen) senilai Rp4,79 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 885 (55 persen) permasalahan senilai Rp782,15 miliar. Kemudian, potensi kerugian sebanyak 344 (22 persen) permasalahan senilai Rp714,43 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 371 (23 persen) permasalahan senilai Rp3,30 triliun.

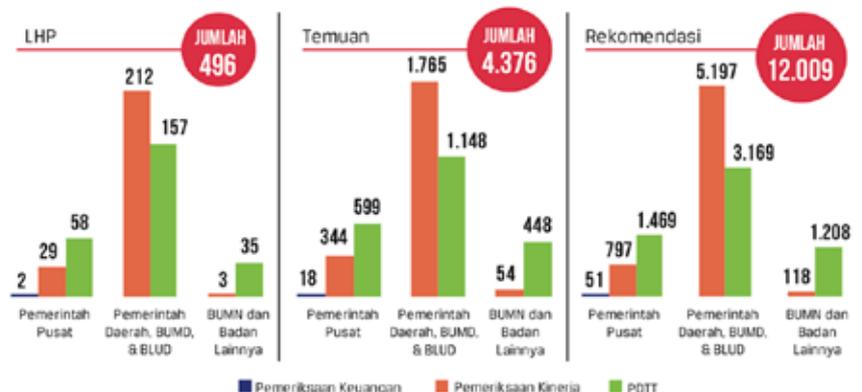
Selain itu, terdapat 561 (26 persen)

permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Dari 2.712 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,50 triliun, terdapat 95 (3 persen) permasalahan ketidakhematan senilai Rp550,61 miliar, 2 (1 persen) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp177,86 juta, dan 2.615 (96 persen) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp950,85 miliar.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, entitas yang diperiksa pada saat pemeriksaan selama Semester II Tahun 2018, telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp393,56 miliar (8 persen).

Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK



Keterangan: Grafik tidak termasuk hasil pemeriksaan investigatif, serta hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD.



Jumlah dan Nilai Temuan/ Permasalahan

1. Jumlah temuan: 4.376
2. Jumlah permasalahan: 6.076
 - Kelemahan SPI: 1.203 (20 persen)
 - Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan: 2.161 (35 persen) Rp4,79 T
 - Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan: 2.712 (45 persen) Rp1,50 T

Pemeriksaan tematik

BPK melakukan pemeriksaan tematik untuk mengawal dan memastikan pengelolaan program prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berjalan transparan dan akuntabel serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pemeriksaan tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak terkait dengan tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan berbagai entitas pemeriksaan.

Ada tiga pemeriksaan tematik yang dilakukan pada semester II 2018.

Pertama, pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Kedua, pengelolaan sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ketiga, pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Pemeriksaan kinerja tematik atas pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS dan PIP untuk tahun anggaran (TA) 2015-semester I tahun 2018 dilakukan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan 54 pemda yang terdiri atas 13 pemerintah provinsi (pemprov), 30 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 11 pemerintah kota (pemkot). Menurut catatan BPK, penetapan alokasi dana BOS oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah berdasarkan alokasi yang diusulkan oleh Kemendikbud; jumlah dana BOS yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi telah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan; dan proporsi penyaluran dana BOS per triwulan telah sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) BOS.

Selain itu, Kemendikbud telah menyalurkan bantuan PIP dari kas negara ke bank penyalur sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) penerima. Na-

mun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa upaya Kemendikbud belum sepenuhnya efektif dan upaya pemda secara umum kurang efektif dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS dan PIP dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun.

Ada empat permasalahan utama yang ditemukan BPK dalam program BOS dan PIP. Yaitu, permasalahan ketepatan jumlah dana, ketepatan waktu penyaluran dana, ketepatan sasaran dana, dan permasalahan *monitoring* serta evaluasi.

Terkait permasalahan ketepatan jumlah dana BOS dan PIP, BPK antara lain menyatakan bahwa Kemendikbud dalam menetapkan dan mengalokasikan jumlah dana BOS belum akurat. Hal ini dilihat dari tidak validnya data untuk menghitung alokasi dana BOS dan besaran satuan BOS yang belum berdasarkan hasil analisis biaya operasional pendidikan serta juknis BOS terkait dengan penghitungan kurang/lebih salur belum sepenuhnya dipedomani.

Pada pemda, penetapan besaran dana BOS belum memperhitungkan kebutuhan biaya operasional sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan data jumlah siswa dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang digunakan untuk menghitung alokasi BOS, tidak sepenuhnya valid. Selain itu, hasil pemeriksaan menemukan perhitungan kurang salur akibat mutasi/perubahan jumlah siswa belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman.

Dalam hal waktu penyaluran, Kemendikbud belum sepenuhnya tepat waktu. Hal ini ditunjukkan dengan penyampaian rekomendasi kurang/lebih salur ke Kemenkeu dan penyaluran dana BOS dari RKUN belum sepenuhnya tepat waktu. Pemda juga belum memadai dalam mengupayakan pencairan dan penyaluran dana BOS yang tepat waktu. Hal ini ditunjukkan dengan lambatnya penerbitan SK Gubernur terkait dengan penetapan alokasi BOS.

Selain itu, hasil pemeriksaan menemukan penyaluran dana BOS dari RKUD provinsi ke rekening sekolah tiap triwulan melebihi waktu yang sudah ditentukan dalam Juknis BOS. Hal ini memengaruhi ketepatan waktu pelaporan realisasi dan penggunaan dana BOS oleh sekolah ke tim BOS provinsi.

Pengelolaan sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan Program JKN

Pemeriksaan kinerja tematik atas pengelolaan sumber daya kesehatan (SDK) dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada 45 objek pemeriksaan, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rumah Sakit Umum Pusat dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS), 42 pemda yang terdiri atas 3 pemprov, 35 pemkab, dan 4 pemkot, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kemenkes, RSWS, pemda, dan BPJS Kesehatan telah berupaya meningkatkan pengelolaan SDK dalam mendukung keberhasilan Program JKN. Kemenkes telah menggunakan sistem informasi dalam penyusunan alokasi dana alokasi khusus (DAK) dan penugasan khusus dokter dan tenaga kesehatan (DTK) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada peserta JKN. RSWS telah memiliki pelayanan rujukan dengan Sistem Rujukan

Terintegrasi (Sisrute) dan telah mengembangkan layanan pusat jantung terpadu (PJT).

Pemda sudah berupaya mengelola SDK, antara lain sebanyak 22 pemda telah berupaya menyediakan puskesmas pada setiap kecamatan, sebanyak 2 pemda telah mendistribusikan alat kesehatan dengan optimal, dan sebanyak 2 pemda telah memanfaatkan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) dengan optimal. Sementara, BPJS Kesehatan telah mengelola kerja sama dengan fasilitas kesehatan (faskes) dan DTK antara lain telah mengevaluasi pelaksanaan kredensialing yang dibuat dalam laporan bulanan *monitoring* fasilitas kesehatan tingkat pertama (FK-TP)/fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).

Selain itu, pelaksanaan kapitasi berbasis komitmen pada FKTP milik pemerintah untuk TA 2017-semester I tahun 2018 telah didukung kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi FKTP pada 34 ibu kota provinsi. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Kemenkes, RSWS, pemda, dan BPJS Kesehatan pada umumnya belum sepenuhnya efektif mengelola SDK dalam rangka penyelenggaraan Program JKN, terutama terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana, alat kesehatan dan DTK.

Permasalahan yang terjadi, antara lain pengalokasian DAK Bidang Kese-

hatan oleh Kemenkes belum sepenuhnya mendukung ketersediaan dan pemerataan SPA. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan dalam penetapan definisi operasional pada rencana strategis (renstra) yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pada sasaran dan indikator renstra dinyatakan puskesmas yang memenuhi SPA sesuai dengan standar, tetapi terdapat penurunan standar definisi operasional menjadi lebih besar atau sama dengan 60 persen dari standar. Selain itu, proses pengalokasian DAK Tahun 2018 belum sepenuhnya mengacu pada peraturan yang berlaku. Permasalahan lain adalah SPA yang bersumber dari DAK belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemda.

Contoh permasalahan lainnya adalah pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan pada 23 dinas kesehatan (dinkes)/puskesmas dan 27 RSUD belum memenuhi standar minimal dan belum memenuhi kebutuhan pasien atas sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan kelasnya. Kemudian, pemenuhan alat kesehatan pada 30 dinkes/puskesmas dan 30 RSUD belum memenuhi standar minimal dan belum memenuhi kebutuhan pasien atas alat kesehatan sesuai dengan kelasnya.

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan

Pemeriksaan kinerja tematik atas pembangunan desa dan kawasan perdesaan dilakukan oleh BPK mencakup tiga hal. Pertama, kegiatan Pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa yang dilakukan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendesa PMK) serta instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, dan Kepulauan Riau.

Kedua, BPK memeriksa kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana



pxhere.com



Desa (ADD) serta Pembangunan Desa pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan 85 objek di 33 provinsi meliputi 80 kabupaten dan 5 kota. Ketiga, kegiatan pembangunan desa pada Pemkab Barito Timur.

Hasil pemeriksaan BPK menyatakan pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa tahun 2017-semester I tahun 2018 kurang efektif. Upaya yang telah dilakukan pemerintah, antara lain, Kemendesa PDTT telah melaksanakan pemutakhiran status perkembangan desa berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2018 yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran Prioritas Nasional Pembangunan Desa. Adapun Kemenko PMK telah mengkoordinasi-

kan 4 kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang menghasilkan Surat Keputusan Menteri Bersama (SKB) Tahun 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Beberapa permasalahan yang ditemukan BPK adalah pola perencanaan koordinasi Prioritas Nasional Pembangunan Desa belum memiliki struktur koordinasi yang berfokus pada perencanaan antarinstansi. Selaku koordinator, Kemendesa PDTT belum memiliki peran dan kewenangan yang jelas. Akibatnya, perencanaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa oleh pemerintah berpotensi tumpang tindih, tidak tepat sasaran, dan tidak terintegrasi.

Permasalahan lainnya, yaitu tata kerja, mekanisme, dan pelaksanaan koordinasi antarinstansi lintas sektoral oleh Kemendesa PDTT belum didukung dengan proses bisnis untuk menghasilkan strategi yang efektif dalam mencapai tujuan Prioritas Nasional Pembangunan Desa. Kemendesa PDTT juga belum menyusun dan menetapkan *masterplan* Sistem Informasi Desa (SID) dalam rangka mengumpulkan data desa. Akibatnya, Kemendesa PDTT, kementerian teknis dan pemda tidak memiliki informasi yang memadai dalam menyusun perencanaan program sektoral terkait kebutuhan desa.

Terkait Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015-semester I tahun 2018 dilakukan pada Kemendagri dan pemda, BPK menyimpulkan pemerintah untuk melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD dapat terlaksana lebih efektif.

Sejumlah permasalahan yang ditemukan pada Kemendagri, antara lain, regulasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan

aparatur desa belum lengkap, mutakhir, dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga terjadi tumpang tindih pengaturan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian, indeks dan instrumen sebagai dasar perencanaan kebijakan dan evaluasi perkembangan desa masih beragam, yaitu Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks Pembangunan Desa (IPD), Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDeskel) sehingga hasil penilaian tingkat kemajuan/perkembangan desa belum dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa.

Sementara, beberapa permasalahan yang ditemukan pada pemda adalah pembinaan pengelolaan DD dan ADD pemda belum seluruhnya memiliki regulasi dan kebijakan yang lengkap, mutakhir, dan selaras, serta terdapat regulasi dan kebijakan yang menghambat pengelolaan DD dan ADD. Selain itu, pemerintah desa belum seluruhnya memiliki regulasi yang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

Terkait pembangunan desa, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembangunan desa TA 2017-semester I tahun 2018 dilakukan pada Pemkab Barito Timur dan pemerintah desa di wilayah Kabupaten Barito Timur, dengan kesimpulan kurang efektif.

Permasalahan yang ditemukan, antara lain, perencanaan pembangunan desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar serta sarana prasarana kesehatan, pendidikan, dan permukiman belum memadai karena penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Desa (RPJM Des) dan RKP Des tidak sepenuhnya melalui musyawarah desa dan penggalian gagasan dari masyarakat melalui pengkajian keadaan desa. Keuangan desa juga belum sepenuhnya dikelola dengan tertib dan terdapat penggunaan uang tunai di luar mekanisme APB Desa. ●

Yang Spesial dari IHPS II 2018

BPK juga dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2018 berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Revbang) Slamet Kurniawan mengatakan, hal spesial yang terdapat dalam IHPS II 2018 adalah banyaknya jumlah tema dan fokus pemeriksaan.

Biasanya, kata Slamet, dalam satu tahun hanya ada 2 hingga 3 tema pemeriksaan yang dilaksanakan BPK.

"Tetapi, sekarang bisa 10 tema dari 12 tema. IHPS II 2018 juga memuat 12 fokus dari 18 fokus pemeriksaan. Ini sangat luar biasa," kata Slamet kepada *Warta Pemeriksa*.

Seperti diketahui, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi, dimensi, dan kondisi perlu. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 fokus.

12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan

ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

BPK juga dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Slamet menjelaskan, pemilihan tema dan fokus pemeriksaan kinerja serta DTT telah didiskusikan dengan Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) dan berdasarkan masukan dari satuan kerja.

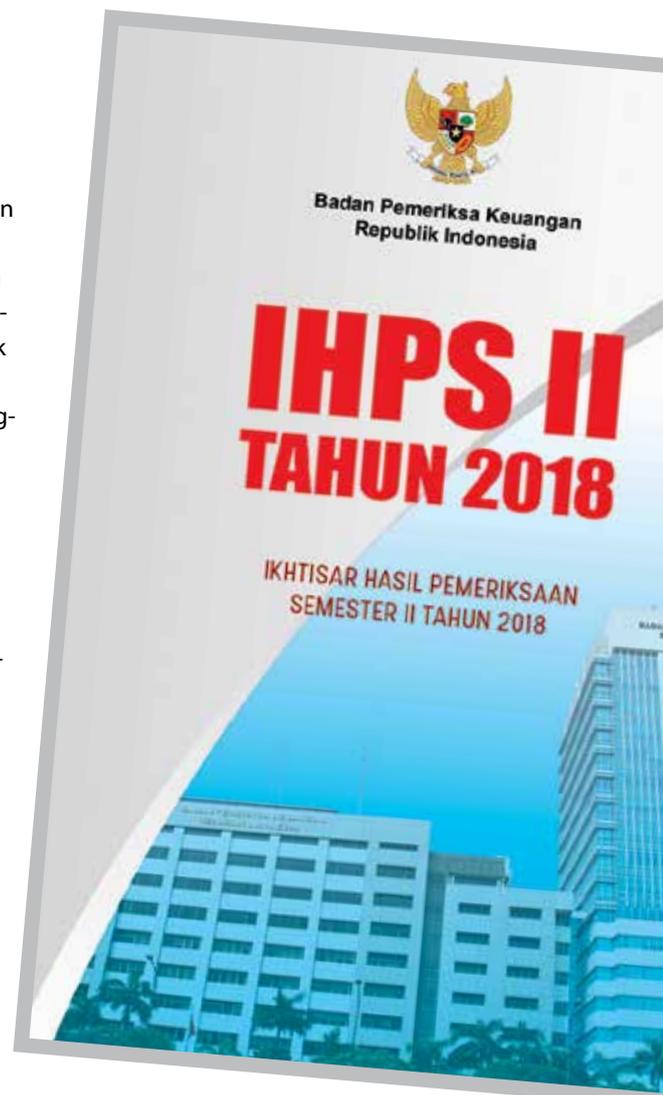
Hasil pemeriksaan kinerja, kata Slamet, antara lain meliputi penyelesaian uang pengganti, pengelolaan data perpajakan, pengelolaan belanja berbasis kinerja, legalisasi aset, pengelolaan ketersediaan dan stabilitas harga pangan, hingga pembangunan kelautan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan, hasil pemeriksaan DTT antara lain mencakup pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan penilaian kembali aset Barang Milik Negara (BMN).

Terkait revaluasi aset, hasil pe-

meriksaan BPK menyimpulkan bahwa BPK tidak menerima hasil penilaian kembali aset BMN 2017-2018. Kesimpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada aspek pengendalian intern. (Laporan selengkapnya di rubrik BPK Bekerja)

Slamet melanjutkan, pemeriksaan yang paling menantang bagi BPK ada-



lah pemeriksaan yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat. Selain itu, pemeriksaan mengenai isu-isu strategis yang menjadi perhatian publik sebagaimana tertuang dalam RPJMN pemerintah.

“BPK harus bisa mengungkapkan dan memberikan gambaran yang objektif kepada *stakeholder* atas program atau kegiatan yang diperiksa tersebut, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan,” ujar Slamet.

Pemeriksaan yang dimaksud Slamet tersebut beberapa di antaranya adalah yang berkaitan dengan pangan, kesehatan, pendidikan, energi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, serta pertahanan dan keamanan.

Sinergi

Tiga pemeriksaan tematik dalam IHPS II 2018 merupakan hasil sinergi antarsatker di BPK. Slamet mengungkapkan, pemeriksaan tematik memang selalu melibatkan lebih dari satu Auditorat Keuangan Negara (AKN).

Salah satu pemeriksaan tematik dalam IHPS II 2018 adalah pengelolaan sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam pemeriksaan tersebut, kata dia, AKN VI memeriksa Kementerian Kesehatan. Kemudian, BUMN yang menyediakan obat-obatan untuk farmasi diperiksa AKN VII.

Sedangkan, BPJS Kesehatan sebagai pelaksana diperiksa oleh AKN VI. Pengambilan sampel di daerah melibatkan AKN V dan AKN VI, bahkan BPK Perwakilan.

“Sinergi ini dilakukan supaya bisa melakukan suatu hasil pemeriksaan yang menyeluruh terkait suatu program atau tema,” ujar Slamet.

Sinergi juga harus semakin diperkuat seiring dipercepatnya periode



■ Kaditama Revbang BPK, Slamet Kurniawan



Pemilihan tema dan fokus pemeriksian kinerja serta DTT telah didiskusikan dengan Direktorat PSMK dan berdasarkan masukan dari satker.

renstra. Pimpinan Badan sebelumnya sudah menyepakati agar Renstra 2016-2020 berakhir pada 2019. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan periode RPJMN 2015-2019 yang disusun Pemerintah.

la menjelaskan, renstra disusun oleh tim kelompok kerja yang terdiri atas AKN-AKN di BPK. Direktorat PSMK bertindak sebagai pusat koordinasi.

“Dari situ muncul bisnis fokus pemeriksaan. Di sana ada penjabaran dari semua kebijakan tema dan fokus pemeriksaan. Setiap fokus pemeriksaan didetailkan perencanaannya, akan

memeriksa apa, tujuannya apa, kapan, siapa yang melakukan, jumlah orang yang terlibat, hingga jumlah anggaran. Jadi, per tahun akan memeriksa apa itu sudah ada acuannya,” ujar Slamet.

Dengan adanya penyesuaian renstra, tak menutup kemungkinan akan ada tema dan fokus pemeriksaan yang seharusnya dilakukan pada 2020, bakal dilaksanakan pada tahun ini.

“Tapi intinya, masing-masing pemilihan tema dan fokus, kita harus menilai secara mendalam. Kita juga harus memberikan laporan selama periode kita melakukan pemeriksaan, apa hasilnya yang sudah dilakukan perbaikan oleh Pemerintah,” ujar dia.

Slamet mengatakan, renstra BPK tak bersifat mutlak. Artinya, semua pemeriksaan tak harus mengacu kepada renstra. Apabila ada hal khusus di masyarakat yang mengharuskan BPK melakukan pemeriksaan, BPK mesti merespons hal tersebut.

“Harus fleksibel. Ke depan juga sudah direncanakan renstra kita tak terlalu kaku. Apalagi, renstra kita berikutnya sangat berbarengan dengan periode RPJMN Pemerintah. Kalau yang sekarang kan kita telat satu tahun. Pemerintah RPJMN-nya 2015-2019, renstra kita 2016-2020,” kata dia. ●

Dari Siber hingga Revaluasi Aset

BPK tidak menerima hasil penilaian kembali barang milik negara (BMN) 2017-2018.

Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 memuat ikhtisar atas 89 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri atas 2 hasil pemeriksaan keuangan, 29 hasil pemeriksaan kinerja, dan 58 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat yang dihasilkan BPK terdiri atas 8 tema dalam Renstra BPK 2016-2020, yaitu perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, mental dan karakter, ketersediaan pangan, pembangunan kewilayahan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 29 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat menyimpulkan pelaksanaan kegiatan secara umum belum sepenuhnya efektif.

Dalam hal keamanan dan ketertiban, salah satu pemeriksaan kinerja yang telah dirampungkan BPK adalah terkait penanganan kejahatan siber yang dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sementara yang berhubungan dengan pangan, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan ketersediaan dan stabilitas harga beras, gula, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras



■ Ilustrasi kejahatan siber

tahun 2015-semester I tahun 2018 pada Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan instansi terkait lainnya.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan kinerja mengungkapkan 344 temuan yang memuat 405 permasalahan senilai Rp698,65 miliar.

Pada semester II 2018, BPK juga mampu menyelesaikan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas penilaian kembali BMN (barang milik negara) 2017-2018. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa BPK tidak menerima hasil penilaian kembali BMN 2017-2018.

Rincian Permasalahan atas Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat:

1. Permasalahan ketidakefektifan

Jumlah permasalahan: 398
Nilai: Rp649,26 miliar

2. Permasalahan kerugian negara

Jumlah permasalahan: 1
Nilai: Rp247,01 juta

3. Permasalahan potensi kerugian negara

Jumlah permasalahan: 3
Nilai: Rp12,68 miliar

4. Permasalahan kekurangan penerimaan

Jumlah permasalahan: 3
Nilai: Rp36,46 miliar.

Sumber: IHPS II 2018

Penanganan kejahatan siber

Salah satu pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK adalah terkait penanganan kejahatan siber. Pemeriksaan kinerja ini dilaksanakan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Menurut catatan BPK, ada empat upaya yang sudah dilakukan Polri untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan siber. Polri diketahui sudah membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber), Biro Multimedia, dan Direktorat Keamanan Khusus Mabes Polri.

Kedua, Polri membentuk Subdirektorat (Subdit) Siber, Subbid Multimedia, Subdit Kamsus, dan Bid Labfor di seluruh kepolisian daerah di Indonesia. Ketiga, telah menetapkan Peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan dijabarkan lagi dalam SOP dengan Peraturan Kepala Bareskrim.

Pada Tahun 2017, Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri juga sudah mengembangkan aplikasi Binmas Online System (BOS) yang merupakan sarana penunjang kegiatan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) dalam menjalankan tupoksinya dalam lingkup nasional secara elektronik dan *online* dalam rangka mendukung program prioritas Kepala Polri yaitu profesional, modern, dan terpercaya.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat kelemahan signifikan yang dapat menghambat kelancaran dalam menangani kejahatan siber. Berdasarkan kelemahan signifikan tersebut, BPK menyimpulkan bahwa penanganan kejahatan siber oleh Polri belum efektif disebabkan beberapa permasalahan.

Berikut beberapa permasalahan tersebut:

Standar minimum kebutuhan penyidik dan analis siber diperlukan dalam rangka membangun kemampuan personel Polri dalam penanganan kejahatan siber.

Tanpa standar tersebut mengakibatkan pengembangan kapasitas personel Polri khususnya penyidik dan analis siber menjadi tidak terarah dan berkelanjutan, serta kebutuhan terhadap keahlian dan kompetensi yang seragam dalam penanganan kejahatan siber tidak terpenuhi.

BPK telah merekomendasikan kepada Kapolri antara lain untuk menyusun strategi penanganan kejahatan siber dan selanjutnya diselaraskan dengan strategi keamanan siber yang sedang disusun oleh BSSN, sehingga keduanya dapat bersinergi dan saling melengkapi.

Rekomendasi lainnya adalah menetapkan satuan atau unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan kampanye pencegahan kejahatan siber dan memerintahkan satuan atau unit kerja yang telah ditetapkan dalam kegiatan pencegahan.

BPK juga merekomendasikan Kapolri agar melakukan kajian untuk membuat metode alternatif dalam rekrutmen personel Polri yang memiliki minat dan bakat untuk mengisi formasi analis siber atau ahli digital forensik pada satker *cybercrime*, memerintahkan Asisten Kapolri Bidang SDM untuk menyusun standar minimum penyidik dan analis siber yang diperlukan dalam penanganan kejahatan siber, dan memerintahkan Kepala Lemdiklat Polri agar menyusun program diklat yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan bagi penyidik dan analis siber.

Ketersediaan pangan

Dalam hal pangan, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan ketersediaan dan stabilitas harga beras, gula, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras tahun 2015-semester I tahun 2018 pada Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan instansi terkait lainnya.

1 Polri belum menyusun dan mendokumentasikan strategi penanganan kejahatan siber. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saat ini masih menyusun strategi keamanan siber nasional yang diharapkan dapat menjadi pondasi bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan di bidang keamanan siber, termasuk Polri selaku penegak hukum. Penanganan kejahatan siber yang dilaksanakan tanpa strategi yang matang berakibat program dan kegiatan dilaksanakan tanpa arah, sehingga berpotensi tidak efektif dan efisien.

2 Polri belum optimal melakukan kampanye pencegahan kejahatan siber. Polri juga belum menetapkan satuan kerja yang bertugas melaksanakan pencegahan kejahatan siber. Minimnya kegiatan kampanye kepada masyarakat akan berakibat perilaku masyarakat di dunia maya menjadi kurang peduli dengan ancaman kejahatan siber dan perilakunya ketika beraktivitas di dunia maya cenderung tidak etis bahkan melanggar hukum. Selain itu, kesadaran masyarakat berperan serta mengkampanyekan pencegahan kejahatan siber menjadi rendah.

3 Standar minimum kebutuhan penyidik dan analis siber belum disusun, serta program pendidikan, dan pelatihannya belum terencana, terstruktur dan berkelanjutan. Kelemahan terkait pengelolaan personel Polri dalam penanganan kejahatan siber antara lain adanya hambatan dalam rekrutmen personel Polri yang memiliki minat dan bakat untuk mengisi formasi analis siber atau ahli digital forensik pada satker *Cybercrime*.



BPK mencatat upaya-upaya yang telah dilakukan Kementerian Perdagangan dalam mengelola ketersediaan dan stabilitas harga beras, gula, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras tahun 2015-semester I tahun 2018

antara lain, penerapan kebijakan harga dan ketersediaan stok/pasokan barang pokok telah dipantau dan dievaluasi secara periodik.

Kemendag pun sudah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga

pemerintah nonkementerian terkait dan/atau pemerintah daerah dalam pengelolaan ketersediaan dan stabilitas harga dengan pendirian gudang, pendaftaran Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi (TDPUD), penyediaan moda transportasi, penunjukan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG), dan pengawasan atas perdagangan antar pulau. Selain itu, pemantauan dan evaluasi atas harga serta stok dilakukan melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Namun demikian, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan ketersediaan dan stabilitas harga beras, gula, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras tahun 2015-semester I tahun 2018 kurang efektif, karena masih ditemukan permasalahan yang menghambat efektivitas.

Permasalahan tersebut antara lain:

1

Perencanaan kebijakan ketersediaan (pasokan dan stok) dan harga belum efektif serta belum terdapat kajian permasalahan kelangkaan pasokan 5 barang kebutuhan pokok. Tim ketersediaan dan stabilisasi harga belum optimal dalam memberikan masukan atau pertimbangan kepada menteri dalam menetapkan kebijakan harga dan ketersediaan harga dan barang kebutuhan pokok, antara lain belum ada pembahasan atas ketersediaan stok dan data pendukung perencanaan kebijakan ketersediaan stok/pasokan dan harga barang kebutuhan pokok belum cukup dan valid serta belum mengkaji permasalahan kelangkaan ketersediaan (stok dan pasokan) atas 5 barang kebutuhan pokok. Akibatnya, penetapan kebijakan harga eceran tertinggi dan harga acuan tidak didukung dengan dokumen yang cukup dan data ketersediaan stok/pasokan dalam pengambilan keputusan tidak valid.

2

Pengelolaan sarana distribusi dan logistik untuk kegiatan perdagangan antarpulau belum optimal. Integrasi data PT Pelindo dengan Kemendag (Sistem Aplikasi Perdagangan Antar Provinsi) dalam rangka menjaga keseimbangan pasokan antara daerah yang surplus dan daerah yang minus belum berjalan dan masih terjadi kesenjangan harga lebih dari 13,8 persen selama tahun 2015-2018, dan pelaku usaha belum mematuhi/melaksanakan ketentuan tentang Manifest Domestic. Akibatnya, data bongkar muat barang kebutuhan pokok di pelabuhan belum valid, tujuan meminimalisir disparitas harga barang kebutuhan pokok pada daerah terpencil belum tercapai, dan data barang kebutuhan pokok yang dikirimkan dalam perdagangan antarpulau tidak valid.

3

Pengelolaan data dan informasi yang dimiliki belum dimanfaatkan dan disajikan secara akurat, tepat guna dan mudah diakses masyarakat. Hal ini terlihat dari masih terdapatnya perbedaan harga yang diinput pada Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) dengan dokumen sumber, variabel yang di-setting di SP2KP tidak sesuai dengan Permen-dag, mekanisme dan sistem pemantauan barang kebutuhan pokok tidak konsisten, penginputan harga pada SP2KP tidak tepat waktu, dan tidak adanya mekanisme pengujian atas data stok yang diinput pada SP2KP serta perbaikan teknik dan metode pemantauan harga barang kebutuhan pokok belum optimal. Akibatnya, data harga harian yang disajikan pada SP2KP dan data ketersediaan stok/pasokan barang kebutuhan pokok tidak valid, serta masyarakat tidak memperoleh informasi harga barang kebutuhan pokok melalui SP2KP.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan agar memerintahkan Tim Bapok untuk melakukan evaluasi ketersediaan dan harga secara periodik, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya memperoleh data ketersediaan stok/pasokan, memerintahkan Direktur Bapokting untuk melakukan pemetaan permasalahan terkait ketersediaan stok/pasokan dan menyusun pedoman struktur harga barang kebutuhan pokok.

Efektivitas Penetapan Daya Tampung PTN dan Pengelolaan Keuangan SNMPTN serta SBMPTN

BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja untuk menilai efektivitas penetapan daya tampung Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan pengelolaan keuangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun anggaran 2016 dan 2017 yang dilaksanakan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan instansi terkait lainnya dengan kesimpulan cukup efektif.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kemenristekdikti dan PTN antara lain sebagai berikut:

- Regulasi penetapan daya tampung telah ditetapkan untuk masing-masing pola penerimaan.
- Panitia Pusat telah melakukan sosialisasi terkait pengisian penetapan daya tampung.
- Panitia Pusat telah membuat prosedur operasional baku (POB) terkait jadwal dan pelaksanaan pengelolaan keuangan SNMPTN dan SBMPTN.



F1 Digitals - Pixabay

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Belum semua PTN memiliki SOP penetapan daya tampung/kuota. Selain itu, Kemenristekdikti tidak memiliki akses guna melakukan monitoring dan evaluasi pada aplikasi beberapa PTN.
- Perencanaan anggaran SBMPTN belum mempertimbangkan sisa dana pelaksanaan tahun sebelumnya untuk bahan pertimbangan penyusunan anggaran berikutnya.
- Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penatausahaan aset hasil pengadaan pada kegiatan SNMPTN dan SBMPTN belum didukung pedoman teknis yang memadai.
- Sisa belanja penugasan SNMPTN dan SBMPTN tahun 2016 dan 2017 belum disetor oleh PTN penerima penugasan dan pengelola keuangan sebesar Rp18,85 miliar.

Salah satu rekomendasi BPK kepada Menteri Ristekdikti terkait permasalahan tersebut antara lain adalah agar menerbitkan Permenristekdikti terkait Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana. Permenristekdikti itu dibutuhkan guna mendefinisikan kembali pengertian seleksi mandiri secara lebih jelas tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman. Kemudian, mengatur penerimaan mahasiswa baru program sarjana terkait pengalihan kuota daya tampung untuk masing-masing jalur dalam rangka mengantisipasi bangku kosong melalui SK Rektor.

Peningkatan produksi perikanan tangkap

Pemeriksaan kinerja peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya tahun 2015-semester I tahun 2018 dilaksanakan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta instansi terkait lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.

BPK mencatat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KKP untuk meningkatkan produksi perikanan

tangkap melalui bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya, antara lain dengan menjabarkan peran dan fungsi strategis KKP dalam menunjang produksi perikanan tangkap dalam Renstra KKP Tahun 2015-2019; menerbitkan Juknis Bantuan Sarana Penangkap Ikan (BSPI) Tahun 2015-2018 yang merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan penerima bantuan dalam penyaluran BSPI; dan merealisasikan BSPI dari tahun 2015-2018 sebanyak 1.903 unit yang terdiri atas 891 unit kapal penangkap ikan ukuran <5 Gross Ton (GT), 759 unit 10 GT, dan 253 unit >10 GT.

Akan tetapi, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa KKP belum sepenuhnya efektif dalam pengelolaan program bantuan kapal perikanan dan prasarana lainnya dalam mendukung peningkatan



Quang Nguyen Vinh - Pixabay

produksi perikanan tangkap, khususnya bagi nelayan penerima bantuan.

Beberapa permasalahan pokok hasil pemeriksaan:

- MoU antara KKP dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum dapat menjamin percepatan proses penerbitan dokumen kapal perikanan pada umumnya dan kapal bantuan pada khususnya. Dalam rangka pengaturan dan pengendalian pengoperasian kapal perikanan, setiap orang/badan hukum yang mengoperasikan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan, wajib memiliki surat ijin usaha perikanan (SIUP), surat ijin penangkapan ikan (SIPI), surat ijin kapal pengangkut ikan (SIKPI), atau bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP). Permohonan pengajuan surat tersebut harus dilengkapi dengan dokumen kapal berupa Surat Laut, Pas Besar, Pas Kecil sesuai ukuran GT kapal. Hasil pemeriksaan antara lain menunjukkan bahwa proses pengurusan dokumen kapal perikanan terkendala dan terdapat kapal bantuan yang diadakan pada TA 2016 dan 2017 belum selesai proses perizinannya. Akibatnya, penerima bantuan tidak dapat segera memanfaatkan kapal bantuan yang telah diterima dan kegiatan usaha penangkapan ikan atas kapal perikanan dan kapal bantuan berpotensi tidak dilengkapi dengan dokumen kapal dan/atau dokumen perizinan yang sesuai ketentuan (*unregulated/illegal fishing*).
- Kapal penangkap ikan sebanyak 956 unit belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima bantuan karena adanya kendala berupa belum adanya dokumen perizinan sebanyak 885 unit; tidak dapat dioperasikan karena mengalami kerusakan sebanyak 13 unit; tidak dioperasikan oleh penerima bantuan karena kendala aspek sumber daya manusia dan aspek keuangan sebanyak 4 unit; belum optimal dimanfaatkan karena faktor lainnya sebanyak 48 unit; dan dimanfaatkan oleh pihak di luar penerima bantuan sebanyak 6 unit. Akibatnya, penerima bantuan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang berasal dari produktivitas kapal perikanan yang belum dimanfaatkan minimal sebesar 4.220,25 ton per tahun; terjadi penurunan nilai ekonomis atas kapal penangkap ikan yang mengalami kerusakan; dan pencapaian tujuan program terkait peningkatan produktivitas dan pendapatan nelayan terhambat.

Pemeriksaan keuangan

Ada 2 laporan keuangan yang dicantumkan dalam IHPS II 2018, yaitu Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2017 dari World Bank dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).

Hasil pemeriksaan atas 2 LKPHLN mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (LK) Global Environmental Facility Trust Fund (GEF TF) yang didanai dari Hibah World Bank Nomor 15470 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas LK Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project yang didanai dari Pinjaman IBRD Nomor 8336-ID pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

BPK memberikan opini TMP atas LK COREMAP-CTI karena sampai dengan berakhirnya pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2018, LIPI selaku Executing Agency (EA) yang menggantikan KKP sejak 19 Juni 2017, tidak dapat menyelesaikan kewajiban penyusunan laporan keuangan. Pemeriksaan hanya dapat dilaksanakan atas unsur kepatuhan berdasarkan *Interim Financial Report (IFR) Quarter I-Quarter IV* dan bukti pertanggungjawaban.

Permasalahan lainnya adalah selama IFR kuartal I, disajikan realisasi penggunaan pinjaman oleh KKP sebe-

sar Rp5,40 miliar dari total dana pinjaman sebesar Rp6,48 miliar sebelum disetujuinya *Amended and Restated Loan Agreement*.

BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat atas nilai tersebut, karena pihak KKP tidak bersedia menyerahkan data dan informasi terkait realisasinya.

Penyajian nilai *refund* pada IFR kuartal IV 2017 dari rekening kas negara ke rekening khusus senilai Rp2,40 miliar atas dana pinjaman dari World Bank belum dapat diyakini sebagai angka penyajian yang handal karena berasal dari informasi temuan audit atas kegiatan yang bersumber dari *loan* dan *grant* saat masih dikelola dan dilaporkan sebagai satu kesatuan laporan oleh KKP.

BPK juga menemukan permasalahan lain yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian atas 2 LKPHLN Tahun 2017. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 18 temuan yang memuat 24 permasalahan, terdiri atas terdiri atas 6 permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 18 permasalahan ketidakpatuhan terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,89 miliar.

Salah satu permasalahan SPI adalah kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terjadi pada 1 LKPHLN. Penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya pengembalian belanja yang bersumber dari Pinjaman IBRD Nomor 8336-ID pada COREMAP-CTI ke Rekening Kas Umum Negara belum dilaporkan oleh LIPI kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu menyebabkan nilai pinjaman luar negeri tercatat lebih besar karena dianggap sebagai realisasi pengeluaran dari rekening khusus pada Bank Indonesia.

Selain permasalahan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 18 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi 14 permasalahan yang mengakibatkan kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,89 miliar (berdampak finansial), serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial)

sebanyak 4 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial terdiri atas permasalahan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 13 permasalahan senilai Rp1,71 miliar dan kekurangan penerimaan sebanyak 1 permasalahan senilai Rp185,27 juta. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah dindiklanjuti dengan menyetorkan uang ke kas negara dan/atau menyerahkan aset sebesar Rp180,85 juta.

PDTT Revaluasi aset

Hasil pemeriksaan BPK atas penilaian kembali aset BMN (barang milik negara) menyimpulkan bahwa BPK tidak menerima hasil penilaian kembali BMN 2017-2018. Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada aspek pengendalian intern.

Permasalahan utama pengendalian intern dalam penilaian kembali aset BMN adalah pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dan SOP belum disusun.

Permasalahan atas Penilaian Kembali Aset BMN yang perlu mendapat perhatian, terutama:

Mekanisme pengendalian atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tidak memadai, yaitu tidak terdapat mekanisme validasi atas hasil inventarisasi yang dilakukan oleh satuan kerja, *quality assurance* dan *quality control* atas hasil penilaian tidak memadai, dan kelemahan pengendalian dalam penginputan hasil penilaian pada Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

Kementerian Keuangan belum mengatur metodologi penilaian tanah secara memadai, yaitu penilaian tanah belum optimal memanfaatkan data harga atas objek pembanding yang dimiliki instansi-instansi pemerintah, terdapat perbedaan faktor penyesuaian atas kondisi yang sama namun tidak memiliki dasar memadai, dan penilaian tanah belum didukung dengan kertas kerja yang memadai.

Nilai wajar hasil penilaian kembali aset nontanah tidak didukung dengan kertas kerja yang memadai dan daftar biaya yang akurat, karena ketidakcermatan dan kelemahan pengendalian.

Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti ketidakakuratan/ketidakkengkapan data BMN, perbedaan nilai wajar SIMAN dan Laporan Penilaian Kembali (LPK), dan ketidakakuratan hasil penilaian. Selain itu, terdapat barang tidak ditemukan dan barang dalam sengketa yang belum selesai ditindaklanjuti. Akibatnya, nilai hasil penilaian kembali sebesar Rp1.365,26 triliun tidak akurat, dan aset dalam sengketa senilai Rp72,39 triliun berisiko dikuasai pihak lain.

Rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan

- Tidak melakukan penilaian kembali atas BMN yang tidak disajikan sebagai aset tetap sesuai SAP dan menyempurnakan proses, kertas kerja dan hasil penilaian atas tanah sesuai standar. Selain itu, mengevaluasi, menyempurnakan mekanisme pengendalian, dan menyusun ulang daftar biaya aset non tanah.
- Menelusuri dan melakukan penilaian kembali atas BMN yang belum diketahui hasil penilaiannya.
- Mereviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi/penilaian dan data pada aplikasi SIMAN, serta bersama instansi terkait mengembangkan sistem informasi data transaksi jual beli tanah.
- Menyusun dan menetapkan kebijakan terkait batasan/definisi atas satu kesatuan bangunan gedung dan penentuan masa manfaat baru serta perhitungan penyusutan bagi seluruh aset tetap non tanah yang masih memiliki masa manfaat.
- Melakukan penilaian kembali sesuai petunjuk teknis penilaian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan praktik yang berterima umum atas jembatan dan bangunan air yang dinilai dengan pendekatan inflasi. ●

PD TT Pendapatan, biaya, dan investasi BUMN

Pada semester II tahun 2018 BPK, telah menyelesaikan pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap 27 objek pemeriksaan pada 26 BUMN/anak perusahaan, antara lain PT Pertamina (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), Perum Pembangunan Perumahan Nasional/Perumnas, Perum



Jason Goh - Pixabay

Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/Perum LPPNPI, PT Pabrik Gula Rajawali II/ PT PG Rajawali II, PT Pupuk Indonesia Energi/PT PIE, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2016-2018.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan investasi BUMN telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 26 objek pemeriksaan dan tidak sesuai dengan kriteria pada 1 objek pemeriksaan. Simpulan tersebut didasarkan permasalahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun aspek 3E.

Permasalahan utama pengendalian intern dalam pendapatan, biaya, dan investasi BUMN adalah pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, SOP belum berjalan optimal,

dan lain-lain kelemahan SPI.

Adapun permasalahan utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3E dalam pendapatan, biaya, dan investasi BUMN antara lain pemborosan/kemahalan harga, piutang berpotensi tidak tertagih, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan dan 3E.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN mengungkapkan 376 temuan yang memuat 655 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 312 kelemahan sistem pengendalian intern, 304 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,27 triliun, dan 39 permasalahan 3E senilai Rp697,91 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMN telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyeteroran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp10,40 miliar. ●



**Penghargaan
Pengelolaan JDIH
Terbaik Tahun 2015**

diberikan oleh
BADAN PEMBINAAN
HUKUM NASIONAL



**Penghargaan
Pengelolaan JDIH
Terbaik Tahun 2017**

diberikan oleh
BADAN PEMBINAAN
HUKUM NASIONAL



**Penghargaan
Pengelolaan JDIH
Terbaik Tahun 2018**

diberikan oleh
KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

BPK Mantapkan Kiprah di Kancah Internasional



■ Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara menandatangani *Action Plan Kerja Sama Bilateral 2020-2021* dengan State Audit Organization (SAO) of Lao People Democratic Republic (PDR) di Vientiane, Laos pada Kamis, 4 April 2019.

BPK sedang mencalonkan diri menjadi Ketua INTOSAI.

Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalani berbagai agenda penting di kancah internasional pada akhir Maret-awal April 2019. Agenda-agenda tersebut mencakup kerja sama bilateral hingga berbagi pengalaman di bidang pemeriksaan.

Pada awal April, tepatnya Kamis (4/4), Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara didampingi Sekretaris Jenderal BPK RI Bahtiar Arif melakukan *high level visit* dan *bilateral seminar* di kantor pusat State Audit Organization (SAO) of Lao People Democratic Republic (PDR) di Vientiane, Laos. Kegiatan tersebut merupakan implementasi kerja sama bilateral antara BPK RI dan SAO Laos yang sudah berlangsung sejak penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tahun 2015.

Rangkaian acara dimulai dengan *courtesy call* antara Ketua BPK dan Vice Prime Minister of Lao PDR, Bounthong Chitany yang sekaligus merupakan Commite Member of The Party Central Inspector dan President of State Auditor and a Central Leader of Anti Corruption of State Organization. Pada kesempatan tersebut, BPK memperoleh apresiasi yang tinggi atas kontribusinya dalam pengembangan kapasitas SAO Lao. Kerja sama dan sinergi yang baik antara kedua pihak diharapkan dapat terus ditingkatkan sebagai upaya peningkatan kualitas pemeriksaan di kedua institusi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional Juska Meidy Enyke Sjam menjelaskan, BPK memiliki lebih dari 20 MoU dengan lembaga pemeriksa negara (SAI) lain. Salah satu MoU itu dijalin dengan BPK Laos.

Juska mengatakan, kedatangan Ketua BPK ke Laos bukan hanya untuk mengimplementasikan MoU yang sudah direncanakan. "Ketua BPK sekaligus melakukan penandatanganan kesepakatan untuk periode 2020-2021," kata Juska kepada *Warta Pemeriksa*.

Kesepakatan baru yang dimaksud berupa *action plan Kerja Sama Bilateral 2020 – 2021*. Ada empat rencana kerja yang akan dilakukan kedua institusi. Yaitu, Pertemuan Tingkat Tinggi Presiden Lao PDR ke BPK tahun 2020 dengan topik "Knowledge sharing on Grading of Auditor Position", Workshop on Audit Quality Assurance Review di Lao PDR tahun 2020, Training on Quality Control Practices on Writing of Audit Recommendation in Financial Audit by the Audit Team di Lao PDR tahun 2020, dan Knowledge sharing on Outsource Audit Firms (Contracting in/out for audit assignment) to Conduct Audits of Government Agencies di BPK tahun 2021.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar turut menghadiri kegiatan internasional. Bahrullah menghadiri Pertemuan Tahunan ke-28 INTOSAI Working Group on IT Audit (WGITA) di Nadi, Fiji, pada 2-3 April 2019. BPK yang merupakan ketua proyek untuk Teknik Audit Berbasis IT yang berakhir pada tahun ini, menyerahkan konsep *data analytics guideline*.



■ Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar bersama Duta Besar LBPP RI di Suva, H.E. R.M. Benyamin Scott Carnadi (kiri) dan Presiden Republik Fiji, H.E. Major-General (Ret'd) Jioji Konrote (tengah) dalam acara Pertemuan Tahunan ke-28 INTOSAI Working Group on IT Audit (WGITA) di Nadi, Fiji, pada 2-3 April 2019.

Bahrullah dalam pertemuan tersebut memaparkan pengalaman BPK memanfaatkan IT dalam melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Ia menjelaskan, salah satu tantangan yang dihadapi pemeriksa BPK dalam melakukan audit LKPP adalah banyaknya data, banyaknya tim audit yang terlibat, dan keterbatasan waktu. Oleh karena itu, BPK melakukan terobosan

dengan memanfaatkan IT untuk mendukung pelaksanaan audit LKPP yang dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan tindak lanjut audit.

Terobosan tersebut meliputi pengembangan beberapa sistem informasi, yaitu Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP), Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL), dan Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD). Dengan adanya aplikasi tersebut, pemeriksaan LKPP dapat berjalan secara efektif dan tepat waktu.

Juska menjelaskan, BPK sebagai *project leader* WGITA melaporkan perkembangan proyek untuk penyusunan pedoman terkait audit atas inovasi teknologi. "Jadi, disampaikan sejauh mana pedomannya itu sudah dilaksanakan, lalu ke depannya akan seperti apa. Itu beberapa hal yang kita sampaikan," kata Juska.

BPK juga terus memantapkan kiprahnya dalam pemeriksaan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sedang dilakukan oleh seluruh BPK di dunia. BPK diwakili Anggota II Agus Joko Pramono menghadiri acara Asia Pacific Forum on Sustainable Development 2019 yang diselenggarakan UNESCAP (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) di UNCC, Bangkok, Thailand, Kamis (28/3). Ia menjadi salah satu pembicara di forum tersebut.



■ Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional, Juska Meidy Enyke Sjam

Anggota II BPK menjelaskan, berdasarkan mandat yang dimiliki, BPK telah melakukan pemeriksaan atas tahap persiapan implementasi SDGs di Indonesia. Pemeriksaan dilakukan terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam mengadaptasi agenda global tersebut ke dalam konteks nasional, mengidentifikasi dan penyiapan sumber daya dan kapasitas yang diperlukan, penyusunan mekanisme tindak lanjut, monitoring dan reviu sejak VNR pertama yang disusun Pemerintah Indonesia pada 2017.

Catatan penting pemeriksaan BPK adalah mengenai disagregasi data pemerintah. BPK mengharapkan agar pemerintah dapat mengusahakan ketersediaan data untuk mempermudah monitoring dan evaluasi atas pencapaian program yang direncanakan.

BPK dan pemerintah Indonesia berkomitmen menjadikan *room for improvement* yang direkomendasikan BPK dapat diimplementasikan dan dilaporkan dalam VNR 2019. BPK juga menyarankan adanya sistem informasi dan pelaporan SDGs global yang akan bermanfaat untuk peyediaan informasi yang dapat diandalkan atas pencapaian target SDG pada level regional dan global.

Juska menjelaskan, kehadiran Anggota II BPK Agus Joko Pramono di acara tersebut bertujuan memperkuat peran BPK



■ Anggota II BPK, Agus Joko Pramono menjadi salah satu pembicara pada Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) 2019 yang diselenggarakan oleh UN ESCAP di UNCC di Bangkok, Thailand pada Kamis (28/3).



■ Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis menghadiri pertemuan ke-12 INTOSAI Working Group on Key National Indicators (WGKNI) pada 2-4 April 2019 di Bratislava, Republik Slovakia.

dalam kancah internasional, salah satunya terkait dengan pemeriksaan SDGs. Dia mengatakan, INTOSAI mewajibkan lembaga pemeriksa di semua negara berperan dalam mengawal implementasi SDGs melalui pemeriksaan. "Melalui pemeriksaan yang dilakukan, BPK ingin mengambil peran itu," kata Juska.

Dia menambahkan, acara di Bangkok tersebut merupakan kegiatan pendahuluan sebelum acara utama digelar di New York pada Juli 2019. Di New York, kata Juska, semua negara akan melaporkan implementasi SDGs di masing-masing negara.

"Untuk yang di New York nanti, kita upayakan pak Ketua BPK tampil di *main event*-nya untuk melaporkan terkait dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan BPK dalam mengawal SDGs. Tapi agenda di sana masih didiskusikan," katanya.

Untuk memantapkan kiprah di kancah internasional, BPK sedang mencalonkan diri menjadi Ketua INTOSAI untuk periode 2025-2028. Juska mengungkapkan, jatah Ketua INTOSAI pada 2025 seharusnya diberikan kepada lembaga pemeriksa di kawasan Afrika.

"Jadi, kita masih menunggu jawaban negara-negara Afrika apakah ada yang mau menjadi ketua atau tidak. Kalau tidak ada, jatah menjadi ketua INTOSAI bisa jatuh ke kita. Kalau 2025 belum terealisasi, ya berarti nanti di tahun 2028," ujar Juska.

Menurut Juska, BPK RI memiliki peluang besar untuk menjadi Ketua INTOSAI. Sebab, sampai saat ini belum ada yang mengajukan diri, selain BPK RI. "Bisa saja kemudian ada yang mengajukan diri. Namun, biasanya, yang pertama kali mengajukan akan diprioritaskan." ●

ISMA YATUN ANGGOTA V BPK

Terus Belajar dan Silaturahmi

Isma Yatun mencatat sejarah di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan menjadi perempuan pertama yang berhasil menjabat sebagai Anggota.

Perjalanan perempuan kelahiran Palembang, 12 Oktober 1965 ini menjadi Anggota V BPK terbilang dinamis. Berlatar belakang pendidikan di bidang teknik, Isma justru menantang dirinya di sektor keuangan hingga dunia politik. Semangat Isma sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh RA Kartini, beberapa abad silam. Isma pun merasa bahwa pencapaiannya saat ini juga tidak lepas dari sebuah tindakan sederhana namun memberikan dampak besar yang dilakukan Kartini.

Justru, dari kamar yang hanya diterangi dengan lampu pelita, Kartini berjuang untuk memajukan perempuan Indonesia yang kala itu masih berada pada status sosial rendah. Perempuan saat ini sudah seharusnya mengikuti semangat yang telah ditunjukkan oleh Kartini tersebut.

"Perempuan itu tidak perlu memanggul senapan untuk berjuang melawan ketidakberdayaan. Akan tetapi, melalui pikiran, perkataan yang indah, dengan tidak perlu hingar bingar, bisa menembus seluruh rintangan yang ada," kata Isma kepada *Warta Pemeriksa* di Jakarta, belum lama ini.

Bagaimana pandangan Isma mengenai Kartini pada era saat ini dan bagaimana upaya serta kunci suksesnya dalam menjalani karier? Berikut hasil wawancaranya.

Ibu merupakan satu-satunya perempuan yang menjadi Anggota BPK sepanjang sejarah. Bagaimana Ibu melihat keberhasilan tersebut?

Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjadi perempuan pertama yang menjadi Anggota BPK. Ini melebihi dari ekspektasi saya.

Alhamdulillah kedua, saya dilantik menjelang hari Kartini, yaitu 20 April 2017. Ini juga tidak terpikirkan oleh saya. Apakah ini memang suatu kebetulan atau memang takdir saya di sini dilantik pas menjelang hari Kartini.

Tapi, memang Kartini itu sudah mempersiapkan untuk perempuan-perempuan agar bisa maju dari sedemikian jauhnya. Beliau sudah berpikir mengenai bagaimana ke depannya perempuan bisa punya peran. Sehingga perempuan-perempuan sekarang bisa punya kesempatan, khususnya saya untuk menjadi Anggota BPK.

Ketiga, *alhamdulillah*-nya, karena saya punya suami dan keluarga yang mendukung saya. Kalau tidak ada itu, tidak bisa. Mereka sering ditinggal dan jarang bertemu dengan saya. Saya sangat berterima kasih karena keikhlasan mereka memberi kesempatan kepada saya untuk mempunnyai jabatan sampai setinggi saat ini.

Bagaimana Ibu melihat sosok Kartini jika melihat pada konteks saat ini?

Kita belajar Kartini itu hanya dari buku dan lagu. Tapi tidak benar-benar tahu siapa Kartini itu. Saya mulai paham mengenai Kartini ketika saya ke Jepara melihat rumahnya Ibu Kartini. Di dalam kamarnya, hanya diterangi lampu pelita, dia bisa menulis surat berlembar-lembar yang kemudian menjadi buku, baru saya terbuka. Bahwa perempuan itu tidak perlu memanggul senapan untuk berjuang melawan ketidakberdayaan.

Akan tetapi, melalui pikiran, perkataan yang indah, dengan tidak perlu hingar bingar, dengan keterbatasan, itu bisa menembus seluruh rintangan yang ada. Menurut saya, aktualisasi pada saat ini, kalau kita punya wawasan, pemikiran, tidak perlu kita merasa hebat. Orang lain akan paham dengan sendirinya kalau kita hebat ketika kita bisa menyampaikannya secara santun dan baik, melalui perkataan dan perbuatan.

Karena orang lain yang melakukan penilaian. Bukan kita yang menilai diri kita sendiri. Kartini itu ketika menulis, tidak menilai dirinya. Justru orang yang di Belanda yang melihat siapa Kartini itu. Jadi menurut saya, kita harus bekerja dan berperan dengan sebaik-baiknya. Pasti itu akan



● Anggota V BPK, Isma Yatun

dilihat dan dinilai orang. Seberapa jauh kapabilitas dan eksistensi kita. Sampai hari ini, menurut saya, apa yang dilakukan Kartini itu tetap relevan.

Secara pendidikan Ibu memiliki latar belakang teknik. Bagaimana akhirnya bisa masuk ke BPK?

Saya tidak melihat bahwa suatu ilmu itu menghususkan kita menjadi terpakai. Karena sebenarnya suatu ilmu itu merupakan landasan agar kita punya kesempatan lebih maju lagi. Misalnya, tidak semua sarjana hukum itu menjadi pengacara atau notaris. Bahkan pernah beberapa dirut Bank Mandiri itu lulusan ITB. Padahal Mandiri itu salah satu bank dengan aset terbesar di Indonesia.

Atau Ibu Susi Pudjiastuti yang hanya lulus SMP punya perusahaan sebesar Susi Air. Jadi menurut saya, tinggal bagaimana kita menggunakan landasan ilmu untuk menjadi lebih baik dan maju. Kebetulan saya, ketika lulus S1 memang bekerja di perbankan.

Pertama kali saya kerja di bank itu, mau tidak mau saya harus belajar akuntansi. Jadi begitu lulus kuliah, ilmu yang menjadi tambahan buat saya adalah akuntansi perbankan. Setelah beberapa tahun bekerja di bank, saya memutuskan untuk keluar dan bergabung pada satu perusahaan untuk men-

jadi semacam auditor persediaan. Sebelum akhirnya saya menjadi anggota DPR RI.

Di DPR, saya duduk di Badan Anggaran dan berurusan dengan neraca pemerintah yang rumit. Di situ saya belajar, seperti apa neraca pemerintah itu. Karena saya punya keingintahuan dan keinginan untuk terus belajar, tambah ilmu, banyak hal yang didapat.

Begitu ada pemilihan Anggota BPK, saya mendaftar. Dengan pemikiran bahwa saya ingin tahu bagaimana jalannya anggaran negara itu. Makanya sarjana apapun kalau dia siap untuk punya tanggung jawab dan mampu, menurut saya tidak masalah. Hanya saja memang harus membuktikan kalau mampu memegang amanah yang diberikan.

Bagaimana Ibu melihat BPK saat ini?

BPK saat ini itu jauh lebih baik dari yang dulu-dulu. Misalnya saja, di Sidang Badan, kita benar-benar diskusi yang produktif. Jadi kita memaparkan substansi yang memang harus diskusikan. Menurut saya, kami Anggota juga saling menghormati dan paham. Kalau pun ada ego dari setiap Anggota, kalau kepentingannya untuk BPK, kita tinggalkan itu semua. Kita harus berpikir sebagai BPK, bukan sebagai individu Anggota.

Kedua, untuk seluruh staf yang ada, menurut saya lebih mudah untuk bisa mendapatkan posisi karena persaingan terbuka. Tidak ada lagi faksi-faksi atau kelompok tertentu yang merasa lebih baik dari yang lain. Sekarang itu dipersilakan kompetisi asal punya kompetensi dan kapabilitas. Itu dibuktikan, sekarang kalau *bidding* siapapun boleh ikut. Ini menurut saya lebih transparan.

Sekarang rotasi pun lebih tersebar tanpa memandang wilayah. Tapi saya tetap melihat bahwa suami-istri harus tetap satu. Mereka yang sedang hamil, menyusui, punya balita, menurut saya, ini harus diperhatikan juga, terutama ketika mereka sedang melakukan audit, mereka bisa tugas keluar kota sampai 30 hari meninggalkan anak-anaknya. Jadi saya berharap mereka tidak ditugaskan terlalu jauh. Ini bukan privilege, tapi lebih ke empati.

Sekarang itu semua lebih terbuka, bisa memberikan saran dan masukan. Tidak ada sekat birokrasi. Saya secara pribadi, semua orang boleh bertemu dan diskusi dengan saya. Ketika ke daerah, saya usahakan untuk masuk ke ruangan teman-teman untuk bisa diskusi dengan mereka. Saya berusaha merangkul semua sebagai Anggota BPK dan ibu bagi mereka.

Apakah seperti itu juga untuk perempuan di BPK?

Menurut data SDM, jumlah pegawai perempuan di BPK, baik kantor pusat atau di 34 kantor perwakilan yang tersebar di Indonesia, berjumlah 2.895 orang dari total 6.930 orang. Itu artinya sekitar 41,77 persen. Untuk pemeriksa, jumlah pegawai perempuan mencapai 36,74 persen dari total pemeriksa BPK. Sementara yang berperan sebagai penunjang dan pendukung mencapai 49,89 persen. Kalau dilihat lagi, CPNS yang diterima dua tahun terakhir ini juga lebih banyak perempuan. Karena ternyata nilainya lebih bagus perempuan.

Apakah ada perhatian khusus, mungkin ada alokasi khusus untuk perempuan di BPK?

Tidak, tapi karena perempuan itu nilainya lebih banyak yang bagus dari laki-laki. Setelah mereka masuk BPK, saya memperhatikan, perempuan itu lebih teliti, ulet, dan integritasnya tidak diragukan. Bukan saya membela perempuan. Tapi perempuan itu tidak mencari uang, itu tugas laki-laki. Jadi kalau ada perempuan sampai korupsi, menurut saya sudah keterlaluan.

Karena saya berpikir, sehebat-hebatnya saya, saya tidak akan hebat kalau anak saya tidak he-



● Anggota V BPK, Isma Yatun

bat. Yang membuat saya hebat itu ibu saya. Ibu saya hebat karena dia bisa membuat saya hebat. Jadi pasti ibu-ibu itu fokus bagaimana mendidik anak-anaknya karena dia menjadi panutan.

Di setiap perjalanan Ibu selalu ada pembelajaran akan hal baru. Apakah hal itu memang kunci Ibu dalam meraih kesuksesan saat ini?

Salah satunya memang seperti itu. Karena kalau tidak belajar, bagaimana kita bisa punya pengetahuan. Apalagi kita harus diskusi dengan orang lain. Kalau diajak bicara terus tidak mengerti dan gagap, maka tidak akan dianggap oleh orang lain.

Belajar itu, tidak dalam teori kita harus sekolah. Tapi dari suatu hal yang sederhana saja, itu belajar. Di Kepulauan Anambas itu, anak-anak sekolah harus menggunakan perahu. Ramai-ramai, mereka duduk di atas atap perahu. Tapi ternyata mereka senang saja. Dari situ saya belajar, anak dengan kondisi seperti itu saja, kalau saya yang jadi ibunya, tidak akan berani menyuruh mereka duduk di

atas perahu. Tapi dengan keterbatasan yang ada, dengan segala macam keinginan untuk maju, mereka berani duduk di atas perahu. Ibunya juga membolehkan mereka untuk begitu. Bandingkan dengan kita yang sudah punya segala macam.

Apakah ada kendala yang dialami perempuan di BPK?

Misalnya ketika hamil. Tidak mungkin kita memeriksa sampai ke daerah jauh. Tapi yang saya khawatirkan saat ini adalah keharmonisan suami-istri. Kalau tidak ada kepercayaan antara suami-istri, itu menjadi hal paling berat. Sekarang itu, dengan media sosial yang luar biasa, kalau tidak saling percaya, mudah sekali untuk tersulut fitnah.

Makanya yang perlu itu, suami-istri harus saling mendukung, ikhlas, dan saling percaya. Karena sehebat-hebatnya perempuan kalau dia sampai pisah dengan suaminya, dan tidak menjadikan anaknya menjadi lebih hebat, itu menjadi tantangan yang berat.

Kalau untuk ibu kendala seperti apa yang pernah dialami?

Tadi kan itu pertama saling percaya. Kedua komunikasi. Tidak hanya ke keluarga, tapi juga ke seluruh jajaran bahwa kita bisa diskusi. Karena saya tidak mau semuanya itu satu arah. Silakan saja mana saran dari teman-teman. Ini yang saya tidak mau. Ini yang terkadang menjadi kendala. Apalagi kebanyakan staf saya itu laki-laki. Jadi kadang suka sulit untuk mengetahui keinginan masing-masing. Kalau saya, itu tidak mau ada Asal Ibu Senang.

Kendala komunikasi itu harusnya bisa diminimalisasi. Karena kalau sampai salah menyampaikan, maka akan repot nantinya. Tapi saya memandang selama ini tidak pernah ada masalah berarti yang besar. Insya Allah juga jangan.

Ada target khusus?

Secara umum saya ingin di setiap perwakilan, di bagian depannya itu digunakan untuk layanan umum. Sehingga tidak semua orang bisa masuk ke bagian dalam, harus ada akses khusus untuk pegawai.

Secara khusus, saya juga ingin di setiap perwakilan itu punya ruang untuk ibu menyusui. Jangan sampai mereka menyusui di antara *filing cabinet*. *Golden age* seribu hari

itu antara lain ditentukan oleh pemberian ASI eksklusif selama enam bulan.

Target khusus lainnya, saya ingin perempuan di BPK bisa lebih berkompetisi dengan yang laki-laki. Karena kadang-kadang, ada perasaan minder bagi perempuan. Nah, tidak usah merasa seperti itu. Saya berharap suatu hari nanti, ada perempuan lain yang mene mani saya sebagai Anggota. Kalau seperti ini baru ada perubahan.

Ada upaya khusus untuk itu?

Saya mendorong teman-teman untuk maju di setiap levelnya. Mulai dari anggota tim pemeriksa kemudian jadi ketua tim dan seterusnya. *Alhamdulillah* terakhir ini mulai banyak perempuan. Dari data terlihat kalau perempuan yang mempunyai jabatan struktural, mulai dari eselon I, II, III, dan IV itu sebanyak 166 orang dari 608 jabatan struktural di kantor pusat dan perwakilan. Jumlah itu setara dengan 27,30 persen.

Ada pesan khusus untuk perempuan lain di BPK?

Sekarang saya melihat di BPK itu tempat kerja yang sangat prestisius. Jadi gunakan kesempatan yang memang ada. Bagaimana kita mengatasi tantangan yang ada menjadi suatu yang bermanfaat. Karena kita punya tanggung jawab dan berkeinginan karier semakin meningkat, tapi tidak meninggalkan identitas kita sebagai perempuan. Jadi diri sendiri tanpa meninggalkan jati diri.

Bagaimana menjaga hubungan dengan keluarga?

Saling percaya dan komunikasi. Apalagi sekarang teknologi sudah canggih. Selain itu, juga harus ada *quality time* dengan bertemu saudara sebanyak-banyaknya.

Setiap ke daerah jika ada saudara, saya usahakan untuk silaturahmi. Kalau ada keponakan yang kuliah di satu daerah dan kebetulan saya ke sana, saya ajak mereka bertemu. Ini sudah saya kerjakan sejak saya belum jadi apapun. Jadi saya selalu berusaha silaturahmi ke keluarga dan kerabat.

Demikian juga saya selalu menjaga hubungan dan silaturahmi dengan teman-teman, dengan waktu yang terbatas saya selalu memanfaatkan untuk tetap menjaga silaturahmi. ●

”

Orang lain akan paham dengan sendirinya kalau kita hebat ketika kita bisa menyampaikannya secara santun dan baik, melalui perkataan dan perbuatan.

I NYOMAN SUWIRTA BUPATI KLUNGKUNG, BALI Berani Melakukan Diskresi

Keberanian melakukan diskresi menjadi satu solusi yang ditempuh pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali dalam pengelolaan dana desa. Hal ini lantaran, banyak ketidaksesuaian antara data kependudukan dan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Karenanya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta berani melakukan terobosan yang disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Dalam beberapa kasus malah dia berani 'melawan' aturan yang dianggapnya tidak sejalan dengan semangat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Terkait definisi masyarakat miskin pun, Nyoman Suwirta menerapkan standar sendiri. "Data Dukcapil dan BPS itu selisihnya tinggi sekali. Maka saya menciptakan ide sebuah aplikasi yang akan menjadi penengah selisih data itu. Dengan demikian desa akan jadi lebih mudah, tinggal buka aplikasinya untuk melihat berapa yang belum kerja, berapa orang yang sarjana," kata dia kepada *Warta Pemeriksa* di kantornya di Klungkung, Bali, belum lama ini.

Dia pun bercerita mengenai berbagai upaya pemerintah kabupaten untuk mengentaskan kemiskinan di 53 desa 6 kelurahan yang ada di Klungkung. Kuncinya, kata dia, prioritas anggaran dana desa yang ada harus digeser. Yaitu dari sebelumnya berfokus kepada pembangunan infrastruktur menjadi pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Berikut wawancara lengkapnya.



■ I Nyoman Suwirta

Bagaimana Bapak melihat program dana desa?

Dana desa merupakan dukungan pemerintah pusat terhadap daerah. Kabupaten Klungkung memang tidak terlalu luas, jadi PAD-nya kecil. Sehingga kalau dulu di desa itu rata-rata hanya mengeluarkan dana sekitar Rp200 juta, sekarang dengan dana desa itu jadi sekitar Rp2 miliar. Ini tentu merupakan sesuatu yang luar biasa sehingga proses pembangunan di desa bisa sesuai dengan Nawa Cita. Intinya dana desa sangat bermanfaat. Kita juga dari kabupaten jadinya tidak perlu mengalokasikan dana yang banyak lagi. Mereka sudah ada dana desa dan dana alokasi desa (DAD). Sehingga kita di kabupaten bisa fokus ke kegiatan besar. Baik jalan, infrastruktur, pelabuhan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Bagaimana penerapan dana desa di Klungkung?

Penerapannya tetap berdasarkan

”

Di Kabupaten Klungkung, masing-masing desa sudah memilah dan mengalokasikan sesuai kebutuhan.

perencanaan yang ada di desa. Berdasarkan Musrimbangdes, akan ditentukan mana yang menggunakan dana desa dan mana yang menggunakan dana kabupaten. Di Kabupaten Klungkung, masing-masing desa sudah memilah dan mengalokasikan sesuai kebutuhan. Yang sekarang ini, pertama itu infrastruktur, kemudian pemberdayaan.

Ke depan, kita akan mengubah lagi. Kita berharap alokasi dana desa ini bisa seimbang, antara infrastruktur dan pemberdayaan. Karena kita sadari, sumber utama kemiskinan, kebodohan, itu dari sumber daya manusia. Termasuk pengangguran dan sebagainya.

Makanya, di kabupaten saya membuat program *Entrepreneur* Masuk Desa yang mulai tahun ini. Kita akan tuntaskan satu anak-anak dari keluarga miskin yang punya potensi. Apa yang jadi potensi dia, akan kita kembangkan. Jadi anak-anak miskin yang selama ini malas bekerja, akan kita tuntaskan.

Termasuk juga Bedah Rumah dan Rehab Rumah, tahun-tahun ini mudah-mudahan tiap desa akan menyeter. Tapi ini memang tidak menggunakan dana desa. Jadi kita akan selesaikan program itu tahun ini. Jadi kita bisa sampaikan bahwa pada 2020 Kabupaten Klungkung sudah menyelesaikan program Bedah Rumah dan Rehab Rumah. Mungkin dananya sekitar Rp20-25 miliar dengan unit sekitar tiga ribu sekian yang sudah berjalan. Tapi itu pun belum semua.

Apakah yakin akan tercapai?

Saya ultimatum semua desa. Tahun ini, Anda harus menyeter Bedah Rumah dan Rehab Rumah. Kita sekarang melakukan diskresi juga. Kalau kita menjalankan Bedah Rumah dengan standar Dinas Sosial, maka banyak masyarakat kita yang tidak bisa dilayani. Maka untuk bantuan rumah ini, kita alokasikan dananya sesuai dengan yang mereka butuhkan.

Jika butuh Rp15 juta, kita berikan Rp15 juta. Dengan begitu, desa nantinya akan bisa fokus dengan infrastruktur. Sekarang jalan desa banyak yang belum selesai. Di desa juga ingin membuat treking dan segala macam, itu bisa dianggarkan dari dana desa maupun DAD.

Sekarang itu, 70 persen dana desa masih fokus ke infrastruktur. Sementara 30 persennya pemberdayaan. Nanti, akan saya ubah. Karena kalau



■ Piagam Penghargaan untuk Pemkab Klungkung

terus-terusan berpikir infrastruktur, misalnya kantor yang megah, ini tidak memberikan *outcome* kepada masyarakat.

Makanya, ke depan akan kita ubah semua. Jadi program *Entrepreneur* Masuk Desa ini bisa menggunakan dana desa. Sekarang masih berkatat di infrastruktur, membangun kantor. Ya kalau sekali boleh, *lah*. Tapi kalau begitu, maka pemberdayaan masyarakatnya akan kurang. Padahal kita sadar, manusia itu aset yang paling mahal.

Target peralihannya kapan?

Pemberdayaan saya kira 2020 sudah kita mulai. Melalui Bedah Desa, saya turun bersama dengan kepala desa, sekda. Dari sini saya ambil data desa. Saya lakukan verifikasi langsung ke lapangan. Mana jalan, irigasi, dan banjar yang rusak dan alasannya mengapa. Jadi di situ bisa ditentukan, mana yang ditangani desa dan kabupaten. Langsung eksekusi pada saat itu. Jadi permasalahan yang ada di desa itu sekarang ini benar-benar kita pegang datanya.

Coba bayangkan kalau saya tidak melakukan Bedah Desa. Dulu, data orang yang disabilitas itu cuma 1.002.

Setelah Bedah Desa, 2.200 lebih. Itu sebabnya, saya katakan, tidak takut kalau data Klungkung itu jelek. Karena dari data valid kita bisa menuntaskan masalah.

Nama aplikasinya Solusi Klungkung. Tapi mungkin nanti akan kita ganti namanya untuk yang lebih bagus.

Bagaimana input data itu?

Klungkung sekarang menganggarkan satu orang tenaga pendamping yang ada di desa yang disebut Yowana Gema Santi. Mereka ini anak muda, sarjana, sebagai kader yang kita taruh di desa. Ini saya buat untuk menindaklanjuti Bedah Desa. Jadi mereka itu benar-benar tahu siapa si A, B, dan si C. Saya berpikir bahwa ini harus ada. Karena pembangunan yang kita lakukan di desa tidak boleh berhenti pada *output*. Tetapi harus berhenti pada *outcome*.

Saya melihat bagaimana di desa itu banyak orang kekar, tapi tidak mau kerja. Itu yang terjadi. Makanya membangun desa dengan dana desa kalau kita tidak berani keluar melakukan diskresi dengan masuk ke arah pemberdayaan, saya yakin tidak akan memberikan manfaat.

Selama ini, bantuan desa itu diberikan merata. Misalnya Rp300 ribu, itu diberikan sama semua. Yang tidak bisa minum susu pun sama saja, diberi susu. Makanya, di sini, kita berikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sehingga dana desa nantinya bisa digunakan untuk itu.

Bagaimana memastikan bahwa data itu valid?

Ada beberapa hal yang kita lakukan melalui inovasi ini untuk validasi dasar. Pertama, selama ini kita tidak tahu, banyak orang menikah tidak mengurus akta perkawinan. Banyak orang lahir dan mati juga tidak mengurus akta. Ini penyebab jumlah penduduk kita tidak pasti. Makanya, inovasi kita, untuk orang menikah, kita langsung bawa akta perkawinannya. Jadi selesai di tempat.

Membangun itu gampang kalau kita tahu permasalahan dan potensi, tahu cerita. Tapi kalau tidak tahu data, mau bilang apa kita? Paling-paling buat jalan, kantor, atau program pemberdayaan yang langsung bubar.

Keterlibatan Yowana Gema Santi dalam hal ini seperti apa?

Aplikasi itu yang setiap saat diinput oleh Yowana Gema Santi. Jadi saya upah Rp2 juta per bulan itu untuk input data. Mereka itu malahan bisa lebih tahu soal desa daripada kepala desanya.

Bagaimana program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan Klungkung?

Ada namanya satu rumah sosial. Sebelumnya, pelatihan yang dilakukan desa, setelah mereka pulang, itu hanya jadi milik pesertanya sendiri saja. Tidak jadi apa-apa. Makanya saya minta dibuatkan satu rumah, jemput masyarakat. Buat mereka pelatihan, produknya kita fokuskan, kita siapkan satu kios. Saya ingin lima tahun masa jabatan saya yang kedua ini bisa tuntas. Jadi sisa kemiskinan itu harapan saya hanya keraknya saja.

Untuk pendidikan, kita ada Satu Desa Satu TK Negeri. Target saya pada 2021, semua TK itu negeri. Kita juga akan bantu dengan angkutan TK, jadi mereka tidak perlu diantarjemput orang tua. Angkutan sekolah gratis sekarang. Kita sudah siapkan juga. Sehingga di desa, bisa lebih fokus.

Mengapa TK?

Karena angka partisipasi kasar sekolah TK cuma 61 persen. Artinya, 39 persen tidak sekolah TK. Ternyata alasannya adalah jaraknya jauh dan biayanya mahal. Makanya saya membuat terobosan dan sejak 2018 berjalan. Harapan saya 2021 itu sudah selesai semua. Jadi pemerintah desa bisa fokus ke pemberdayaan. Jadi untuk tugas-tugas yang memengaruhi IPM kita, pendidikan, kesehatan, itu sudah selesai semua.

Apa maksudnya kerak kemiskinan yang Anda jelaskan sebelumnya?

Saya memilah kemiskinan jadi dua, permanen dan tidak permanen. Jadi yang permanen itu orang-orang yang hidup sebatang kara. Mereka yang sudah lumpuh dan tidak ada siapa-siapa. Permanen itu harus ditangani pemerintah daerah.

Yang tidak permanen, mereka yang memiliki kemampuan tapi tidak bekerja. Misalnya ada KK miskin yang menikah makanya kemudian dia menjadi KK miskin baru. Ini biasanya bergantung saja. Ini nanti akan saya pilah. Satu, kalau orang tidak berpendidikan, akan kita kasih bantuan sapi. Desa juga akan bantu nanti. Dua, kalau mereka mau latihan, jadi tukang bangunan misalnya, kita bantu dengan alat. Mau jadi tukang cukur, tukang masak, kita latih.

Saat ini fokus dana desa masih ke pengembangan infrastruktur?

Iya. Untuk infrastruktur, di desa itu kita fokuskan pada pengembangan destinasi desa wisata. Saya sedang mengarahkan agar pemberdayaan semua desa masuk ke pariwisata. Beberapa desa pariwisata juga sudah jadi.

Nusa Penida, misalnya, puluhan ribu tamu itu masuk ke sana. Maka tamu

itu nanti akan saya geser agar masuk ke Klungkung. Sedang saya buatkan namanya badan pengelola dan satu konektivitas. Saya akan buatkan pelabuhan segitiga emas yang sekarang sudah masuk tahap FSDD (*feasibility study and detail designs*). Sehingga tamu nanti, dari Sanur masuk ke Nusa Penida dan balik lagi ke Klungkung. Jadi pemberdayaan akan benar-benar berfungsi.

Ada masukan untuk dana desa?

Lembaga ekonomi di desa itu terlalu banyak. Dulu koperasi dengan badan hukum. Kemudian berubah menjadi PNPM. Di provinsi, ada namanya Gerbangsadu Mandara, inovasi gubernur. Sekarang, ada namanya BUMDes. Berapa banyak jalur distribusi itu? Di desa ada namanya LPD (lembaga perkreditan desa). Pusing itu kepala desa yang mana yang mau dihidupkan.

Masukan saya, hidupkan koperasi. Karena ini merupakan ekonomi desa yang lengkap dengan badan hukum dan konsep dari, oleh, untuk masyarakat itu ada di sana. Bahkan saya itu sudah membuat program *holding company*. Jadi nanti akan bikin supermarket dan ini milik masyarakat semua, mereka jadi *member*. Jadi semua orang belanja dapat pembagian SHU.

Data Perkembangan Dana Desa Kabupaten Klungkung

Tahun	Pagu	Realisasi	Penyerapan (%)
2015	15.260.570.000	14.252.510.318	93,39
2016	34.259.137.000	33.041.538.881	96,45
2017	44.540.097.000	43.991.019.730	98,77
2018	43.276.499.000	40.328.540.714	93,19
2019	51.533.982.000	—	—

Sumber: Kabupaten Klungkung



Saya juga ada Beli Mahal Jual Murah. Di desa sekarang, orang jual gabah bisa dapat peningkatan Rp2-3 juta per hektare. Jadi saya tugaskan KUD untuk membeli gabah lebih mahal dari harga pemerintah. Harga pemerintah Rp3.750. KUD bisa membeli Rp4.500-Rp5.000, dan itu ditimbang. Kalau oleh tengkulak, itu taksiran. Dengan program ini, petani jadinya luar biasa.

Untuk jual murah, maka pembelian beras bisa ditekan. Di Nusa Penida, dulu harga beras itu mahal sekali. Sejak saya terapkan ini, KUD wajib menjual berasnya, kepada PNS lebih dulu, lebih murah dari harga umum, Rp500 lebih murah. Bayangkan berapa ton kita butuh beras dan berapa efisiensi yang bisa kita lakukan. Ini yang namanya menekan inflasi. Saya harapkan desa juga memahami fungsi-fungsi ini.

Untuk jangka menengah atau panjang, peran dana desa seperti apa?

Saya yakin, ke depan, dana desa harus dipikirkan. Ada desa yang besar dan kecil. Karenanya, pemerintah harus mengevaluasi peruntukan dana desa itu, harus diatur. Fokusnya ke mana? Apakah pemberdayaan atau yang lainnya. Makanya desa itu harus

”

itu sebabnya, saya katakan, tidak takut kalau data Klungkung itu jelek. Karena dari data valid kita bisa menuntaskan masalah.

benar-benar tahu prioritas pembangunan apa saja. Nanti suatu saat, saya yakin desa itu bisa optimal. Jadi desa jangan sampai bingung dana desa itu akan dibawa ke mana.

Ada rencana untuk tidak menggunakan dana desa ke depannya?

Kita masih butuh. Dana desa itu banyak, sementara infrastruktur kabupaten masih banyak yang belum selesai dan ini banyak ada di desa. Sedangkan desa tidak diperbolehkan

untuk mengerjakan aset kabupaten. Makanya, kalau perbaikan jalan desa itu sudah selesai, mau perbaiki apa lagi?

Saya maunya dana desa ke depan itu masuk ke pemberdayaan. Ini yang saya yakin butuh dana tinggi. Makanya saya sekarang berani mengalahkan infrastruktur untuk pemberdayaan.

Ada target atau rencana khusus yang ingin dicapai?

Target ke depan, semua harus terukur. Kita bisa tahu, di desa A berapa kemiskinan? Dengan anggaran sekian, maka target sekian harus turun. Jadi target ke depan yang tersisa itu hanya kerak kemiskinan.

Pada periode kedua ini saya ingin mewarisi sistem. Sehingga siapapun yang nanti akan menjadi bupati, tidak akan bisa sewenang-wenang mengubah sistem yang ada.

Bagaimana Bapak melihat kerja sama dengan BPK terkait dana desa?

Sekarang BPK sudah masuk ke desa-desa. Terlepas dari adanya temuan macam-macam, saya persilakan saja. Temuan apapun itu merupakan bagian dari edukasi. Kalau memang ada hukumannya, ya saya siap terima. Karena kita punya keterbatasan.

Makanya ini sekarang tantangan kepala desa dan seluruh jajarannya. Ketika menerima dana besar, mereka harus tahu administrasi juga. Tidak boleh sembarangan. Bagaimana membuat perencanaan, APBDes, mengelola, dan mengevaluasi. Evaluasi diri sendiri itu penting.

Makanya dengan BPK masuk ke desa, saya justru senang. Kalau ada temuan dan hal yang harus dikoreksi, ya silakan. Saya malah senang jika ada yang jelek dan kemudian terkuak. Lebih baik terkuak daripada tidak tahu. Jadi bisa diselesaikan sama-sama. Saya sering ajak orang BPS dan BPJS turun ke lapangan. Jadi mereka bisa lihat kalau data kemiskinan kita itu jomplang. ●

NOVY GREGORY ANTONIUS PELENKAHU STAF AHLI BPK BIDANG BUMN/BUMD DAN KEKAYAAN NEGARA/DAERAH YANG DIPISAHKAN LAINNYA

Pemeriksa Harus Rajin Membaca

Novy Gregory punya kontribusi yang penting bagi negara selama menjalani kariernya di Badan Pemeriksa keuangan (BPK). Dia adalah salah satu pemeriksa BPK yang memeriksa kesiapan negara menghadapi krisis keuangan global pada 2008. Novy bahkan menjadi bagian dalam INTOSAI Task Force on Global Financial Crisis atau satuan tugas BPK se-Dunia yang dibentuk untuk menelaah permasalahan krisis finansial global. Pria asal Manado itu juga pernah mengemban amanah sebagai wakil penanggung jawab pemeriksaan investigasi atas kasus Bank Century. Kepada *Warta Pemeriksa*, Novy bercerita secara panjang lebar tentang pengalamannya di berbagai kegiatan pemeriksaan krusial yang dilakukan BPK. Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana bapak memulai karier di BPK?

Kalau berdasarkan NIP, saya mulai CPNS bulan Maret 1988. Tapi, saat itu saya ke BPK hanya untuk prajabatan dan ambil gaji.

Sementara, saya mulai aktif bekerja setelah lulus D-3 di STAN, tahun 1989. Kalau tidak salah sekitar bulan Agustus saya ditempatkan di Auditorat H. Tak lama kemudian, saya lupa persisnya, saya dapat tugas pertama melakukan pemeriksaan Taman Impian Jaya Ancol, BUMD DKI Jakarta.

Setelah itu, saya ikut program pelatihan bernama Electronic Data Processing (EDP) Audit sekitar tahun 1990/1991. Waktu itu saya dan beberapa orang lainnya merupakan *batch* pertama yang mempelajari pemeriksaan berbasis elektronik.

Seusai pelatihan tersebut, kami kemudian *training* di Kuala Lumpur.

Ketika kembali dari Kuala Lumpur, saya ikut mengajar EDP Audit di BPK.

Tahun 1992, saya ikut pendidikan D-4 untuk jadi akuntan. Setelah jadi akuntan, sekitar 1995, saya sebenarnya masih berstatus sebagai penilik di BPK kala itu. Kalau sekarang kan namanya auditor terampil. Dahulu, di BPK, ada yang namanya verifikator untuk level SMA, penilik untuk level D-3, kemudian pemeriksa muda untuk lulusan S-1. Saya tahun 1995 baru sarjana, tapi status saya masih penilik.

Sekitar tahun 1996 atau 1997, saya dipercaya menjadi ketua tim pemeriksaan laporan keuangan Merpati. Padahal status saya masih penilik. Biasanya di BPK, untuk jadi ketua tim minimal harus jadi pemeriksa muda. Kalau sekarang namanya auditor ahli.

Jadi, saya dulu belum menjadi pemeriksa muda, tapi saya bersyukur sudah dipercaya menjadi ketua tim

saat itu.

Di tahun 1997, saya ikut seleksi untuk S-2. Saya lulus tes dari hasil seleksi di BPK dalam program TPA (tes potensi akademik) yang dijalankan Bappenas. Salah satu persyaratan waktu itu kalau tidak salah nilai TOEFL minimal 550.

Saya termasuk yang ikut dalam *batch* pertama pendidikan BPK ke luar negeri. Sebelumnya, sudah ada juga program pendidikan ke luar negeri, tapi waktu itu yang menyelenggarakan bukan BPK, melainkan Kementerian Keuangan.

Waktu itu, kami dididik di Amerika Serikat. Awal-awal itu kami menjalani pendidikan Bahasa di Sacramento tahun 1997 sebelum kuliah. Saya S-2 MBA Information System diterima di George Washington University. Mulai kuliah itu saya ingat betul saat musim semi, sekitar Januari 1998. Selesai kuliah pada Juli atau Agustus 1999.



■ Novy Gregory Antonius Pelenkahu

”

Saya dulu belum menjadi pemeriksa muda, tapi saya bersyukur sudah dipercaya menjadi ketua tim saat itu. Itu sekitar tahun 1997.

Adakah pengalaman menarik selama mengenyam pendidikan di George Washington University?

Satu hal yang menarik bagi saya, waktu itu tahun 1998 *kan* sedang terjadi krisis finansial Asia. Jadi, mahasiswa yang berasal dari Asia diberikan kesempatan untuk bekerja.

Setelah berdiskusi dan mendapatkan izin dari kantor, saya kemudian bekerja sebagai auditor internal di universitas saya. Pihak kantor mengarahkan pekerjaan itu untuk menambah pengalaman tapi jangan sampai mengganggu

pendidikan.

Saya lulus dengan IPK memuaskan. Jadi, walaupun bekerja, saya tetap menunjukkan tanggung jawab dengan meraih IPK yang tinggi.

Setelah lulus S-2 di Amerika dan kembali ke Indonesia, apa tugas pertama yang bapak dapat?

Saya kembali tahun 1999. Saat saya masih di Amerika, saya dapat pesan dari pimpinan, yaitu pak Usman Damanik. Saya diminta segera pulang karena saya akan dilibatkan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Bank Indonesia.

Saat itu baru saja diberlakukan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan berlakunya UU tersebut, pemeriksaan laporan keuangan BI berubah dari sebelumnya diperiksa BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) ke BPK. Ketika saya pulang, saya ingat sekali waktu itu hari Kamis, saya menghadap beliau (pak Usman Damanik). Saya diminta hari Senin sudah masuk untuk ikut melakukan pemeriksaan.

Biasanya, teman-teman kalau baru kembali dari pendidikan di luar negeri, diberikan waktu istirahat hingga beberapa pekan. Tapi saya tidak, waktu itu pak Usman Damanik berkata ke saya, “Kamu Senin masuk ya, kamu mau saya usulkan ikut tim pemeriksaan.”

Pemeriksaan laporan keuangan BI terbagi dua, yaitu pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja diketuai pak Hasan Bisri. Sementara, pemeriksaan laporan keuangan saya yang ditunjuk menjadi ketua timnya. Saat itu, pak Hasan Bisri sudah Eselon III sebagai kasubaud, sementara saya masih golongan III. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dahulu BPK memberi kesempatan pegawainya untuk menghadapi tantangan.

Apa yang bapak dan tim periksa saat itu?

Kita memeriksa neraca awal Bank Indonesia per 17 Mei 1999. Bl waktu itu kita berikan opini *disclaimer*. Sebelumnya, opini Bl dari BPKP selalu WTP. Kita berikan *disclaimer* dengan salah satu pengecualian terbesar yang terkait dengan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang tercatat waktu itu sebesar Rp144 triliun, tapi kita meragukan kewajarannya.

Bukan hanya soal BLBI yang jadi permasalahan, ada juga masalah pengendalian intern, aplikasi-aplikasi yang lemah sehingga laporan keuangannya terganggu. Kebijakan akuntansi juga lemah.

Saat itu, dapat dikatakan BPK berperan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BI melalui rekomendasi-rekomendasi yang kita berikan. Mereka melakukan banyak perbaikan. Perbaikannya juga tidak hanya di BI, tapi juga di anak perusahaannya seperti Indoverbank, YKKBI (Yayasan Kesejahteraan Karyawan BI), dan dana Pensiun BI. Kenapa kita ikut memeriksa YKKBI dan Dana Pensiun BI, karena yayasan tersebut menerima dana kesejahteraan dari BI untuk karyawan, dan dana pensiun BI. Pada intinya, kita berikan rekomendasi agar mereka lebih efisien dalam pengelolaan keuangannya.

Saya juga terlibat pemeriksaan investigasi BLBI. Ketua timnya pak Hasan Bisri, saya jadi wakil ketua tim bersama pak Hendar dan pak Widodo. Tahun 2001 saya dipromosikan menjadi eselon IV terkait pemeriksaan BI. Saya jadi kepala seksi audit BI untuk sektor moneter.

Kemudian, saya juga ditugaskan melakukan pemeriksaan investigasi khusus terkait dana YPPBI atau Yayasan Pendidikan Perbankan Indonesia Bank Indonesia.

Singkat cerita, saya dengan pak I Nyoman Wara naik pangkat luar biasa dari Eselon IV.A jadi IV.B dalam waktu dekat. Kemudian kami dipromosikan jadi eselon II, itu bulan Agustus 2008.

Saya jadi Kepala Auditorat II.A terkait penerimaan negara membawahi pemeriksaan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).

Anda juga pernah terlibat dalam pemeriksaan Bank Century. Apa saja tantangan yang dihadapi saat itu?

Pemeriksaan Bank Century kalau tidak salah dilakukan pada 2009. Saya jadi wakil penanggung jawab bersama pak I Nyoman Wara. Sekitar bulan Oktober-November, BPK mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi terkait Bank Century yang pertama. Saat itu juga terjadi perubahan pimpinan BPK. Ada 5 anggota baru. Ketua BPK pun berubah dari pak Anwar Nasution menjadi pak Hadi Purnomo.



Jangan lihat diri kamu sekarang, lihatlah 20 tahun lagi kamu jadi apa.

Pemeriksaan dimulai pada zaman pak Anwar Nasution. Penyelesaian laporan di era pak Hadi Purnomo. Yang unik dan jadi tantangan, waktu itu kita memeriksa wapres pak Budiono, ibu Sri Mulyani juga kita wawancarai, termasuk pak Jusuf Kalla.

Menurut saya, hal menarik pada saat pemeriksaan Century yang juga perlu menjadi perhatian para pemeriksa kita adalah, BPK saat itu dipertanyakan oleh DPR apakah kita sudah mengikuti semua prosedur atau tidak. Waktu itu kita pemaparan di DPR dipimpin pak Hadi Purnomo.

Apa yang dipertanyakan oleh DPR saat itu?

Yang dipertanyakan terkait masa-

lah apakah pelaksanaan pemeriksaan BPK sudah sesuai standar atau belum. Mereka menyoroti apakah ada komunikasi hasil pemeriksaan dari pihak yang diperiksa. Saya sebagai salah seorang wakil penanggung jawab, satu hal yang sangat kami tekankan adalah prosedur. Karena kalau kami tidak melaksanakan salah satu prosedur saja, berarti laporan kita *failed*. Kita bisa langsung dinyatakan salah.

Tapi saat itu kami sangat fokus soal itu. Bahkan saking *concern*-nya dan karena waktu penerbitan laporan sangat sempit, diskusi dengan pihak yang diperiksa itu bahkan kita lakukan hingga tengah malam.

Apa kiat-kiat yang dilakukan ketika menerima kepercayaan untuk terlibat dalam berbagai pemeriksaan krusial bagi negara. Apalagi, Anda beberapa kali dipercaya menjadi ketua dan wakil ketua tim meskipun secara pangkat belum seharusnya menjabat posisi itu?

Ada satu hal yang kita sebagai pemeriksa itu harus benar-benar perhatikan dan serius. Sebenarnya semuanya itu sudah di standar pemeriksaan. Pada saat kita memeriksa, kita harus benar-benar memahami proses bisnis. Kita juga harus totalitas, misalnya dengan melakukan riset sendiri. Bahkan, saya sendiri pertama kali memeriksa BI sewaktu baru kembali dari kuliah S-2 untuk gelar MBA, saya membaca seluruh peraturan ataupun pemberitaan apapun semua yang terkait bisnisnya Bank Indonesia. Kita harus baca. Bahkan, saya waktu itu membaca minimal kalau tak salah 8 laporan keuangan bank sentral negara lain.

Saya membaca laporan keuangan bank sentral AS the Federal Reserve, bank sentral Kanada, Korea, Thailand, Australia, New Zealand, Inggris, Malaysia, hingga laporan keuangan the Bank For International Settlement (BIS).

Saya ingat sekali saya bikin kajian sendiri laporan keuangan dan akuntansi bank sentral. Akhirnya saya dapat pemahaman bagaimana seharusnya



■ Novy Gregory Antonius Pelenkahu

laporan keuangan dan akuntansi bank sentral. Dan opini BPK pun agak unik sebenarnya waktu itu. Kalau laporan kementerian dan lembaga lain mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Kalau BI, mengacu pada prinsip akuntansi umum dan praktik yang biasa terjadi di bank sentral.

Anda juga pernah mewakili BPK dalam INTOSAI Task Force on Global Financial Crisis pada 2009-2011. Bisa diceritakan apa yang tim BPK lakukan saat itu?

BPK saat itu aktif dalam beberapa *working group* di INTOSAI, salah satunya di Task Force on Global Financial Crisis. Ada tim besar dan subtim. Pak Anwar Nasution kala itu karena beliau ekonom, beliau menyatakan Indonesia akan menjadi *leader* subtim bagian krisis ekonomi terkait masalah stimulus fiskal. Kita memimpin Rusia, Hungaria, Italia, dan beberapa negara lainnya. Kalau tak salah ada 5-6 negara yang kita pimpin. Sementara subtim lain dipimpin Kanada, Swedia, dan Cina.

Tantangan saat itu, pak Anwar kemudian selesai menjabat sebagai Ketua BPK dan digantikan oleh pak Hadi Purnomo. Tapi kita tetap harus

meneruskan. Di BPK, kebetulan ada mas Gunawan Wisaksono. Dia salah satu ahli ekonomi makro di BPK. Jadi saya bisa berkolaborasi dengan mas Gunawan. Dia ahli ekonomi makro, saya ahli pemeriksaan.

Kita menampilkan tulisan dari hasil kajian Indonesia, Italia, Hungaria, Rusia, Australia. Tulisan ini secara garis besar menunjukkan apa peranan lembaga pemeriksa negara terkait stimulus fiskal. Oleh Amerika Serikat yang saat itu menjadi ketua Task Force, tulisan kita dianggap terbaik karena merepresentasikan pemikiran ekonom dan pemeriksa. Sementara, tulisan lain seperti yang dibikin oleh Swedia itu ekonom *banget* karena yang membuat itu mantan deputy gubernur bank sentral Swedia yang saat itu menjadi wakil ketua BPK-nya Swedia.

Ketua *task force* bilang ke saya, 'Novy, setelah saya baca semua, saya paling suka yang ini. *Paper* yang kalian buat itu menjadi gambaran apa yang bisa dilakukan BPK apabila terjadi krisis ekonomi. Kita memberikan semacam panduan.

Sebagai Staf Ahli Bidang BUMN/ BUMD dan Kekayaan Negara/Dae-

rah Yang Dipisahkan Lainnya, apa yang sedang bapak siapkan saat ini?

Kalau melihat tupoksi, saya pertama harus membuat kajian terkait bidang saya. Saat ini saya sedang berkoordinasi dengan Binbangkum untuk memberikan masukan terkait masalah kerugian negara/daerah pada BUMN/ BUMD.

Terkait BUMN, saya juga nantinya akan memberikan masukan agar pemeriksaan-pemeriksaan BUMN bisa terintegasi. Misalkan kita memeriksa PTPN (PT Perkebunan Nusantara). PTPN itu ada banyak hingga PTPN XIV. Nah, integrasi itu contohnya terkait rekomendasi yang sudah kita gunakan untuk PTPN 'A', apakah bisa digunakan ke PTPN lainnya atau tidak. Begitu juga dengan *best practice* di suatu PTPN untuk ditularkan ke PTPN lainnya dapat digunakan sebagai kriteria pemeriksaan.

Tapi, pada intinya, BPK harus dapat membantu BUMN mencapai tujuannya. Caranya dengan memastikan pemeriksaan BPK itu memberikan dampak dan manfaat. Saya juga ke depan akan membuat kajian mengenai urgensi kehadiran BUMD.

Apa pesan bapak bagi para auditor muda di BPK?

Salah satu pesan yang ingin saya sampaikan adalah pesan dari pak Amrin Siregar (mantan anggota BPK). Saya ingat sekali beliau pada 1989 berpesan kepada para PNS baru termasuk saya, 'Jangan lihat diri kamu sekarang, lihatlah 20 tahun lagi kamu jadi apa.'

Sementara kalau pesan dari saya pribadi, para pemeriksa harus banyak membaca, berlatih menulis dengan Bahasa Indonesia yang baik. Teman-teman auditor muda saat ini ibaratnya jauh lebih beruntung daripada generasi kami. Karena dari segi penghasilan tidak mungkin orang BPK itu miskin, dengan penghasilan yang ada mau apa saja itu sudah terpenuhi. Jadi bersyukurlah bisa bekerja di BPK. Salah satu wujud syukur itu dengan bekerja secara profesional. ●

Menaklukkan Sungai Mahakam



Perjalanan menuju dua kecamatan di hulu Sungai Mahakam bisa dikatakan sebagai perjuangan hidup dan mati.

Proses pemeriksaan yang dilakukan para pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tak pernah luput dari tantangan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan segala kondisi yang ada wajib dimiliki pemeriksa.

Hal tersebut seperti dialami Ayudya Dheny Arfianto yang sejak 2014 bertugas di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Salah satu momen paling berkesan baginya selama bertugas di BPK Kaltim adalah ketika ia dan rekan-rekannya ditugaskan ke Kabupaten Mahakam Ulu pada 2016 untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015.

Kabupaten tersebut merupakan kabupaten termuda di Kaltim. Kabupaten ini diresmikan pada 2013 lalu, sehingga baru berusia 9 tahun pada tahun ini. Kabupaten Mahakam Ulu merupakan pemekaran dari Kabupa-

ten Kutai Barat.

Pria yang akrab disapa Ayud itu menceritakan, saat ditugaskan pada 2016 lalu, kondisi infrastruktur di Kabupaten Mahakam Ulu masih sangat minim. Mereka adalah tim kedua yang ditugaskan ke sana, setelah sebelumnya ditugaskan tim LKPD TA 2014 sebagai tim perdana.

Tak mudah untuk menuju Kabupaten Mahakam Ulu. "Kami menggunakan seluruh jenis moda transportasi dan dibutuhkan hampir setengah hari perjalanan untuk sampai di Ujoh Bilang, ibukota Kabupaten Mahakam Ulu," kata Ayud kepada *Warta Pemeriksa*.



Perjalanan dimulai dengan penerbangan dari Bandara di Samarinda (dulunya di Bandara Termindung, sekarang di Bandara APT Pranoto) menuju Bandara Melalan di Kutai Barat. Penerbangan menggunakan pesawat ATR dan memakan waktu sekitar 45-60 menit perjalanan. Dari Bandara Melalan, tim melanjutkan perjalanan darat ke Pelabuhan Tering sekitar 60 menit perjalanan.

Sesampai di pelabuhan, tim melanjutkan perjalanan dengan menggunakan *speedboat* menyusuri Sungai Mahakam menuju Ujoh Bilang yang memakan waktu sekitar 4 jam perjalanan. Dalam perjalanan sungai ini terda-



■ Pelabuhan dan Jembatan Gantung Tiang Ohang, Long Apari



■ Ayudya Dheny Arfianto

pat beberapa titik pemberhentian, semacam *rest area* bagi para penumpang *speedboat* untuk dapat istirahat/makan. Tempat istirahat tersebut berupa warung apung di atas sungai.

“Perjalanan menyusuri sungai ini bukan hanya memakan waktu cukup lama, tetapi juga membutuhkan keahlian motoris yang berpengalaman, khususnya dalam mengenali kondisi sungai,” ucapnya.

Tak jarang, kata Ayud, dalam perjalanan dijumpai batang-batang pohon besar yang hanyut di sungai. Selain itu, terdapat titik-titik sungai yang ternyata memiliki kedalaman yang dangkal atau terdapat batu-batuan di bawah air.

Keahlian dan pengalaman motoris *speedboat* sangat diperlukan untuk menjamin perjalanan menuju Ujoh Bilang berjalan dengan aman dan lancar. Perjalanan ini akan menjadi lebih panjang jika terdapat gangguan pada penerbangan Samarinda ke Kutai Barat. Terkadang terjadi permasalahan teknis maupun karena keterbatasan kuota tiket (dari segi jumlah kursi maupun frekuensi penerbangan), sehingga mereka harus menempuh perjalanan darat selama 7 jam dari Samarinda ke Kutai Barat.

Sesampai di Ujoh Bilang, penginapan yang cukup memadai masih terbatas jumlahnya. Sehingga, tim pemeriksa harus pesan jauh-jauh hari jika ingin mendapatkan kamar. Kondisi penginapan juga tidak nyaman penginapan di kabupaten/kota lain. Ukuran kamar kurang lebih 8-10 meter persegi.

Namun sekarang, sudah terdapat kemajuan dari segi kenyamanan bagi penginap. Hampir semua kamar sekarang sudah dilengkapi dengan kamar mandi, AC dan televisi kabel. “Sedangkan dahulu kamar hanya dilengkapi



■ Area sekitar Pelabuhan Ujoh Bilang



■ Pasar Ujoh Bilang pada tahun 2016



■ Area Long Bagun, cek fisik pembangunan menara BTS

dengan kipas angin, tidak semua ada AC, TV maupun kamar mandi,” katanya.

Akan tetapi, masih terdapat persoalan ketersediaan air bersih. Masyarakat masih menggunakan air dari sungai langsung untuk digunakan dalam keperluan sehari-hari. Belum ada PDAM pada Kabupaten Mahakam Ulu. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan air, baik untuk mandi, mencuci, masak dan minum menggunakan air sungai.

Masyarakat setempat juga masih melakukan MCK di sungai. Hal ini tidak terlepas dari budaya masyarakat yang lama tinggal di tepi sungai. Pemerintah setempat telah memiliki program untuk pemindahan budaya MCK di sungai menuju MCK di sarana yang lebih sehat.

Kondisi sarana komunikasi dan listrik pun disebut dia masih sangat

jauh dari ideal. Sejak berdiri pada 2013, ujarnya, Kabupaten Mahakam Ulu masih memiliki masalah komunikasi. Di ibukota kabupaten hanya terdapat 1 menara telekomunikasi bertenaga diesel. Sehingga, jangkauan cakupan tidak terlalu luas dan ketika bahan bakar diesel habis sinyal komunikasi putus.

Listrik di Mahakam Ulu belum dilayani oleh PLN sepanjang waktu. Terdapat satu PLTD milik PLN yang dapat memberikan layanan listrik selama 12 jam, dari jam 6 malam sampai 6 pagi.

Dengan kondisi tersebut, terdapat kendala yang cukup berarti bagi tim ketika ditugaskan ke sana. Tak jarang tim kehilangan informasi penting mengenai kebijakan pemeriksaan maupun isu terkini pemeriksaan karena tidak dapat terhubung dengan tim lain melalui media sosial grup WA dan lainnya. Padahal saat ini, medsos sudah jamak digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi. “Bahkan terkadang kebutuhan supervisi/koreksi berjenjang dari Pengendali Teknis/Wakil Penanggung Jawab/Penanggung Jawab juga sedikit terganggu karena persoalan komunikasi ini.”

Setali tiga uang, kondisi infrastruktur pemerintahan juga tidak jauh berbeda. Kantor Bupati Mahakam Ulu menggunakan bekas kantor kecamatan sebagai tempat pusat pemerintahan. Keadaan ruangan, baik dari jumlah, kondisi, kelengkapan dan lainnya masih jauh dari kata memadai.

Bahkan, Ayud menambahkan, kantor kecamatan di Kabupaten lain di Kaltim mungkin masih terasa lebih memadai, apalagi jika dibandingkan dengan kondisi di Jawa.

Dari segi ekonomi, harga barang di Mahakam Ulu jauh lebih mahal dibandingkan harga di Samarinda, bisa mencapai 2-3 kali lipat harga normal di Samarinda. Hal ini terjadi karena barang-barang yg dijual adalah barang dari Samarinda yang dikirimkan melalui sarana sungai selama 2-3 hari perjalanan. Biaya pengiriman barang yang mahal berdampak pada harga jual barang di Mahakam Ulu.



■ Pembukaan jalan Long Lunuk-Tiong Ohang

Pemerintah setempat mencoba meringankan beban masyarakat dengan memberikan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) bagi pedagang agar menurunkan ongkos produksi dan harga barang. Kebijakan ini bertujuan baik tetapi juga memiliki risiko penyalahgunaan.

"BPK melalui pemeriksaan yang dilakukan melakukan pengujian untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak disalahgunakan di lapangan. Ekonomi biaya tinggi di Mahakam Ulu juga tampak dari harga sewa penginapan. Meskipun fasilitas kamar penginapan masih terbatas dan kurang memadai, tetapi harga sewa penginapan disana tidak jauh berbeda dengan harga menginap di hotel bintang lima di Balikpapan/Samarinda (Rp700-800 ribu per malam)," kata Ayud.

Kabupaten Mahakam Ulu terdiri atas 5 kecamatan. Jika dilihat dari perjalanan mulai dari Pelabuhan Tering, dua kecamatan awal (Laham dan Long Hubung) bisa dikatakan relatif maju,



karena kecamatan terdekat dengan Kutai Barat, kabupaten induknya semula. Di tengah terdapat Kecamatan Long Bagun yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan Kabupaten Mahakam Ulu (Kampung Ujoh Bilang berada di kecamatan ini). Semakin ke arah hulu terdapat dua kecamatan yaitu Long Pahangai dan Long Apari.

Dua kecamatan ini bisa dikatakan kecamatan paling tertinggal dibanding kecamatan lain, karena lokasinya yang jauh dari ibukota kabupaten. "Perjalanan menuju dua kecamatan di hulu Sungai Mahakam ini bisa dikatakan perjuangan hidup dan mati," katanya.

Dari segi waktu, masih dibutuhkan 4 jam perjalanan menggunakan *speedboat* atau *longboat* (jenis perahu yang lebih diperuntukkan untuk mengangkut barang). Akan tetapi, dari segi rute yang dilewati, perjalanan ini menem-
puh risiko yang sangat berbahaya.

Perjalanan berangkat merupakan perjalanan melawan arus sungai dan melewati riam yang cukup deras. Ada dua riam yang terkenal kegasannya, yaitu Riam Udang, karena bentuknya yang melengkung seperti udang, dan Riam Panjang, yang konon merupakan rangkaian riam-riam yang banyak dan menyambung menjadi satu.

"Dalam perjalanan melewati riam ini, dapat dibayangkan kita melakukan arung jeram, dengan posisi melawan derasnya arus sungai dan menggunakan perahu berbahan fiber atau kayu. Sehingga seandainya terdapat kesalahan dan *speedboat/longboat* menghantam batu, bisa dipastikan perahu akan pecah dan penumpang terlempar ke arus sungai yang deras,"

Ayud menuturkan.

Keganasan rute ini sudah seringkali memakan korban jiwa. Terakhir kali, pada 21 Maret 2019 lalu terjadi kecelakaan *longboat* menuju Long Pahangai yang memakan korban 1 orang meninggal dan 3 orang hilang.

Ia mengaku sangat bersyukur karena perjalanan tim saat itu dilindungi sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan selamat. "Kami juga terus berdoa khususnya bagi tiap tim dan keluarga BPK Kaltim yang akan bertugas di sana," katanya.

Pemerintah, baik pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten) telah melakukan upaya pembangunan jalur darat yang dapat menghubungkan Tering di Kutai Barat sampai dengan Long Apari di Mahakam Ulu. Proses pembangunan masih berjalan sampai sekarang. Diharapkan jalur transportasi darat akan lebih meningkatkan keamanan bagi masyarakat dan menurunkan biaya produksi/harga barang di Mahakam Ulu.

Sesampainya di Long Apari, ada sedikit keunikan. Infrastruktur lingkungan lebih bagus jika dibandingkan dengan Ujoh Bilang. Penginapan di Long Apari lebih memadai dibandingkan di Ujoh Bilang. Kondisi ini karena di Long Apari dulu sempat menjadi daerah bisnis sarang walet dan tambang emas yang cukup ramai.

Akan tetapi, terdapat kondisi yang cukup ironis di mana kendaraan roda empat/mobil adalah suatu barang istimewa yang jarang sekali dilihat oleh anak-anak disana. Ketika negeri ini sudah merdeka selama 73 tahun, masih ada anak-anak yang berlari mengejar mobil kami untuk sekadar menumpang.

"Memberikan tumpangan dan melihat keceriaan anak-anak tersebut memberikan dorongan bagi tim untuk semakin bertanggungjawab dalam menjalankan tugas sebagai Pemeriksa BPK yang mengawal harta negara agar dapat digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia," ujar dia. ●

Mengubah Hobi Jadi Mesin Penghasil Rupiah



Kunci untuk mempertahankan bisnis adalah terus melakukan inovasi dan pintar mencari peluang.

Jasa transportasi menjadi salah satu peluang bisnis yang menjanjikan di kota besar mengingat kebutuhan yang tinggi serta beragam. Hal ini disadari betul oleh Rommy Pandu Sarastomo (36 tahun, seorang pegawai BPK yang bertugas sebagai Protokol di BPK perwakilan Surabaya.

Berawal dari pekerjaannya yang terdahulu sebagai pengemudi taksi di salah satu perusahaan transportasi ternama di Surabaya serta hobi *travelling* yang dimilikinya, ia kemudian berpikir untuk memulai bisnis di bidang transportasi.

Keputusannya untuk memulai bis-



nisnya dilatarbelakangi hal sederhana. Yang terbesit dalam benaknya saat itu adalah betapa menyenangkannya bisa menjalankan hobi dan dibayar dalam waktu yang bersamaan dari bisnis transportasi.

“Sangat menyenangkan bisa berlibur tapi dibayar, dan saya melihat sebuah peluang yang menjanjikan.” ujar pria yang akrab disapa Rommy kepada *Warta Pemeriksa*.

Hingga akhirnya tahun 2007, Rommy bertekad dan memberanikan diri untuk memulai usaha rental mobil dan *tour* pertamanya. Seiring berjalannya waktu, bisnisnya berkembang pesat. Kini rental mobil miliknya yang berlokasi di Jl Kalijudan Taruna IV no 4 Surabaya ini itu melayani perusahaan dan perorangan.

Modal awalnya memulai usaha rental mobil tidaklah begitu besar. Di awal merintis, ia mengaku tak memiliki modal yang cukup banyak. Ia terlebih dahulu menggandeng rekan bisnis sebagai penyedia armada.

“Saya memulai bisnis dengan modal yang tidak banyak karena saya juga memiliki *partner* bisnis,” tuturnya.



Rommy menawarkan berbagai macam jasa sewa, mulai dari sistem sewa harian hingga sistem kontrak. Tidak hanya itu, Rommy menawarkan *driver* yang bisa sekaligus disewa beserta mobilnya. Sedangkan untuk masalah harga sewanya, menurut Rommy, sangat fleksibel tergantung tujuan si penyewa mobil serta unit mobil apa yang ingin disewanya.

Namun sebagai gambaran, rentang harga sewanya mulai dari Rp250 ribu hingga Rp1,8 juta. Jika dengan *driver* dikenakan biaya tambahan sebesar Rp200 ribu. Hingga saat ini, bisnis rental mobilnya sudah memiliki 12 unit kendaraan antara lain Avanza, Innova, Pajero, Fortuner, dan Alphard.

Setiap bisnis tentu memiliki tantangannya tersendiri. Apalagi di era transportasi *online* yang saat ini berkembang cepat. Kata dia, kunci untuk mempertahankan bisnis adalah terus melakukan inovasi dan pintar mencari peluang.

"Karena di era yang semakin maju, semakin marak usaha rental mobil dan lainnya, maka dari itu persaingan semakin ketat. Dari situ kita harus bisa membaca peluang," jelasnya.

Risiko menjalani bisnis penyewaan mobil pun tak kecil. Menurutnya, ada dua risiko yang paling harus diwaspadai, yaitu unit yang hilang dibawa kabur oleh si penyewa mobil ataupun kecelakaan di jalan raya.

Meski begitu, risiko tersebut tak menyurutkan tekadnya untuk menjalankan bisnis tersebut. "Karena mengerjakan sesuatu yang kita senangi akan membuat semuanya lebih mudah," tuturnya.

Ada risiko, ada keuntungan. Bagi Rommy, bisnis rental mobil cukup menjanjikan. Setiap hari ada sekitar lima hingga 10 unit kendaraan yang disewa pelanggan. Dari hasil bis-

nisnya itu, ia mengaku dapat meraup omzet sebesar Rp80 juta-Rp120 juta.

Selain keuntungan materi, Rommy merasakan ada keuntungan lain yang didapat dari bisnisnya tersebut, yaitu selalu bertemu teman dan lingkungan baru. Hal ini menurutnya membuat wawasan dia menjadi semakin luas. Relasi yang terbangun juga bertambah.

Rommy menyarankan bagi siapapun yang ingin memulai bisnis, termasuk rental mobil, mesti selalu berusaha dan tidak pernah mudah menyerah untuk mempelajari hal-hal baru. Hal yang tak kalah penting, kata dia, adalah memperluas jaringan.

"Karena dalam sebuah bisnis transportasi, ini tentunya berhubungan dengan masyarakat luas. Buat teman-teman yang ingin memulai usaha rental mobil, selalu berusaha jangan lelah untuk selalu belajar dan perluas jaringan," katanya. ●



”

Saya memulai bisnis dengan modal yang tidak banyak karena saya juga memiliki *partner* bisnis.

MUSEUM BPK RI



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dibentuk berdasarkan UUD 1945 pasal 23 ayat 5. Selanjutnya dengan penetapan Pemerintah RI No.11/Oem tanggal 28 Desember 1946, BPK RI membuka kantor pertama di Magelang.

Pada waktu pertama kali dibentuk, Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai pegawai 9 orang dan R. Soerasno diangkat sebagai Ketua, Dr. Aboetari diangkat sebagai Anggota dan Djunaedi sebagai Sekretaris yang berfungsi penuh mulai tanggal 1 Januari 1947.

Bangunan yang terletak di sayap kiri gedung Kantor Karesidenan Kedu menjadi kantor pertama Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam upaya BPK RI lebih dikenal di lingkungan masyarakat luas, Pimpinan Badan Periode 1993-1998 bertekad untuk membangun Museum BPK RI yang bertempat di Magelang. Dipilihnya Kota Magelang, karena kota Magelang mempunyai nilai historis yang merupakan tempat pertama kali terbentuknya BPK RI. Pembangunan Museum tersebut diresmikan oleh Ketua BPK RI, Prof. DR. JB. Sumarlin pada 4 Desember 1997.

Kemudian, pimpinan Badan Periode 2014-2019 yang diinisiasi oleh Wakil Ketua

BPK, Spto Amal Damandari, berinisiatif untuk melakukan pengembangan Museum BPK. Pengembangan Museum BPK ini bertujuan untuk lebih memperkenalkan BPK lebih dekat dengan masyarakat dan juga dengan memperhatikan tren museum post-modern.

Museum BPK RI merupakan salah satu Museum modern di Indonesia yang terletak di kompleks eks Karesidenan Kedu. Jalan Panzeran Diponegoro No 1 Kota Magelang, Jawa Tengah. Museum BPK RI pertama kali diresmikan pada 4 Desember 1997 dengan luas bangunan 163,80 m², kemudian pada tahun 1999 mengalami pengembangan menjadi 260,16 m², dan pada tahun 2016 Museum BPK RI dilakukan perluasan lagi. Kini luas Museum BPK RI menjadi 3.880m².

Hingga kini Museum BPK telah memiliki 14 ruangan, antara lain:

- ❖ Ruang Lobby
- ❖ Ruang *Audiovisual*
- ❖ Ruang Wajah BPK
- ❖ Ruang Titik Nol
- ❖ Ruang Sang Ketua
- ❖ Ruang BPK
- ❖ Ruang Rekam Jejak
- ❖ *Kids Museum*
- ❖ Ruang *Storage*
- ❖ Ruang Perpustakaan
- ❖ *Temporary Exhibition*
- ❖ Ruang Souvenir
- ❖ *Cafeteria*
- ❖ Ruang Kantor



Tidak hanya memiliki visi sebagai pusat pelestarian nilai dan pengetahuan serta hasil kerja BPK yang komunikatif, edukatif, dan kreatif yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK. Museum ini juga memiliki beberapa misi, antara lain:

1. Menyelenggarakan pembelajaran tentang tugas, peran, dan sejarah BPK bagi pegawai BPK dan masyarakat umum.
2. Menyebarkan informasi tentang kinerja BPK dalam mengawal pengelolaan keuangan negara melalui pameran dan program-program publik.
3. Melaksanakan riset yang terkait perlindungan, pengembangan, pemanfaatan nilai dan pengetahuan tentang BPK. ●



Melestarikan Kesenian Karawitan

Peralatan gamelan yang hingga kini masih digunakan komunitas Artha Santosa Budaya dibeli pada 1997. Meski sudah berusia 22 tahun, peralatan gamelan itu masih dalam kondisi yang sangat bagus.



■ Lambang Artha Santosa Budaya BPK RI

Sejak tahun 1995, paguyuban kesenian karawitan aktif berkegiatan di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Paguyuban bernama Artha Santosa Budaya itu dibentuk untuk melestarikan kesenian Jawa tersebut.

Kesenian karawitan di BPK awalnya bermula dari kegiatan warga kompleks perumahan BPK yang berlokasi di Gandul dan Kebon Jeruk, Jakarta. Sekitar tahun 80-an, warga kompleks BPK di Gandul dan Kebon Jeruk kerap berkumpul dan memainkan karawitan.

Suratno KS (74 tahun) merupakan salah satu sosok yang memiliki peran besar dalam menggeliatkan seni karawitan di lingkungan BPK. Ia masih ingat betul bagaimana ia beserta warga lainnya menghidupkan karawitan.

Awalnya, kata Suratno, para warga kompleks BPK di Gandul membeli alat gamelan dengan cara patungan. Sedangkan, alat gamelan di kompleks BPK di Kebon Jeruk merupakan alat pinjaman dari Taman Mini Indonesia

Indah (TMII).

Seiring berjalannya waktu dan tingginya antusias pegawai BPK untuk bermain gamelan, para pimpinan BPK Pusat kemudian mengaktifkan kegiatan kesenian karawitan di gedung BPK. Alat yang digunakan kala itu merupakan pinjaman dari Departemen Transmigrasi. Kebetulan, Departemen Transmigrasi saat itu memiliki banyak peralatan gamelan untuk dikirimkan kepada para transmigran di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelum dikirim ke seluruh daerah, satu perangkat lengkap gamelan dibawa ke BPK untuk dipinjam terlebih dahulu sebagai alat latihan komunitas gamelan.

Ketika kegiatan karawitan mulai aktif di lingkungan kantor BPK Pusat, saat itu juga Suratno kembali ke Jakarta setelah sebelumnya ditugaskan di BPK Perwakilan Medan. Setibanya di Jakarta, Suratno diminta oleh Dharma Wanita untuk mengajar gamelan. Sedangkan pelatih untuk tim pria, menggunakan pelatih profesional yang didatangkan dari luar.

Seiring berjalannya waktu, Suratno memberikan masukan kepada ibu-ibu Dharma Wanita yang dilatihnya bahwa gamelan yang digunakan untuk latihan tersebut harus diperbarui atau digantikan dengan yang lebih layak.

"Waktu itu saya bilang kepada ibu-ibu 'Bu, ibu-ibu tidak mungkin bisa pintar kalo gamelannya kayak begini, gamelannya harus yang bagus, yang perunggu atau kuningan, baru ibu-ibu bisa pintar" ujar Suratno menirukan pesannya saat itu.

Tidak lama berselang, usulan Suratno itu diteruskan kepada pimpinan. Singkat cerita, pimpinan BPK setuju



■ Suasana latihan karawitan PEPASKA dan Dharma Wanita BPK



■ Suasana latihan karawitan

untuk membeli peralatan gamelan baru. Namun, ia terlebih dahulu harus melakukan survei untuk mencari harga dengan kualitas terbaik.

Peralatan gamelan yang hingga kini masih digunakan oleh komunitas Artha Santosa Budaya dibeli pada 1997 dengan harga Rp45 juta. Meski sudah berusia 22 tahun, peralatan gamelan itu masih dalam kondisi yang sangat bagus.

Setelah memiliki alat gamelan sendiri, menurut Suratno, para anggota komunitas semakin rajin dalam berlatih. Meski begitu, kegiatan kesenian karawitan di BPK sempat vakum, aktif, dan vakum lagi dalam beberapa tahun.

Barulah pada September 2018, komunitas Artha Santosa Budaya mencoba menghidupkan kembali kegiatan rutinnnya dengan berlatih setiap Jumat di Gedung Arsip lantai 3. Suratno mengatur sedemikian rupa jam latihan. Ia mengatakan, jadwal latihan untuk pegawai pada jam 07.00 WIB-09.00 WIB. Sedangkan dari jam 9 pagi ke atas, merupakan jatah Persatuan Pasca Karya BPK (PEPASKA) dan Dharma Wanita.

Suratno tak sendirian dalam meng-



■ Suratno KS

urus komunitas Artha Santosa Budaya. Ia di sana berperan sebagai pelatih. Suratno didampingi pelatih profesional lulusan S1 Karawitan Institut Seni Indonesia (ISI) bernama Sugiono. Adapun posisi Ketua Paguyuban dipegang oleh Bagio dari PEPASKA.

Komunitas gamelan saat ini memiliki sekitar 30 anggota. Namun, yang aktif berlatih sekitar 20 anggota.

"Tidak hanya tim pemain musik yang ada di dalam komunitas ini, ada juga tim vokal atau sinden yang tergabung di dalam komunitas ini dan masih berada di bawah asuhan pelatih Artha Santosa Budaya," kata Suratno.

Ia mengatakan, tujuan didirikan komunitas ini untuk melestarikan budaya. Menurutnya, tidak ada keinginan mendirikan komunitas ini agar bisa main di mana-mana.

"Kami aktif di komunitas ini lebih kepada rasa cinta terhadap kesenian. Bagi para pensiunan, kegiatan ini adalah hiburan. Mereka yang di rumah tidak memiliki kegiatan setelah pensiun, bisa mengisi waktu dengan berkese-nian," katanya.

Belum lama ini, komunitas Artha Santosa Budaya pernah diminta tampil

dalam acara perayaan ulang tahun BPK, tepatnya pada 14 Januari 2019. Persiapan untuk tampil cukup panjang, yakni sekitar 4 bulan.

"Saat itu kami tampil sekitar 20 sampai 30 menit," kata dia.

Suratno mengaku ingin membawa komunitas Artha Santosa Budaya untuk mengikuti lomba karawitan di DKI Jakarta. Setiap tahun, kata dia, ada lomba karawitan di tingkat DKI. Ia sangat ingin komunitas gamelan BPK bisa menjuarai lomba tersebut.

"Rencana kedepannya itu, target yang paling bisa diwujudkan nanti selain melestarikan budaya dan hiburan untuk kesehatan adalah ikut lomba karawitan di DKI. Kalau kita bisa berhasil, tentu akan menjadi kepuasan tersendiri," katanya.

Suratno pun menitipkan harapan kepada pegawai-pegawai BPK yang masih muda untuk bisa melestarikan kegiatan dan kesenian karawitan. Menurutnya, generasi muda BPK memiliki bakat yang baik untuk melanjutkan.

"Pesan saya, karawitan di BPK ini harus dilangsungkan dan diteruskan para generasi muda. Harus ada regenerasi di komunitas ini," ujar dia. ●



■ Artha Santosa Budaya ketika pentas di Syukuran HUT BPK, Januari 2019



■ Suasana latihan karawitan

Rakor untuk Tingkatkan Sinergi

Acara ini digelar agar ada persepsi yang sama dari seluruh jajaran BPK untuk mengolah dan menyajikan informasi yang disampaikan.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kehumasan 2019 di Bali, pada 20-22 Maret 2019. Rapat dihadiri oleh sekitar 120 orang dari Biro Humas dan Kerja Sama Internasional maupun Subbag Humas/Humas dan Tata Usaha (TU) dari seluruh Perwakilan dari Aceh sampai Papua.

Sekjen BPK Bahtiar Arif menjelaskan, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan sinergi dalam komunikasi dan kehumasan seluruh humas di seluruh provinsi. Tema penyelenggaraan rakor kali ini yaitu "Sinergi Kehumasan untuk BPK yang Berprestasi".

"Hasil yang diharapkan adalah menyadari betapa pentingnya kehumasan, baik secara eksternal, maupun internal, melalui strategi komunikasi yang terpadu, terarah dan sistematis untuk menyampaikan pesan komunikasi yang baik sekaligus membuat komunikasi menjadi lebih baik di seluruh *stakeholders* BPK," kata Bahtiar saat memberikan sambutan.





■ Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar

Beberapa materi yang dibahas antara lain, konsep dan strategi kehumasan yang efektif dalam humas pemerintahan. Termasuk hubungan dengan pemangku kepentingan. Dibahas pula pada kesempatan itu mengenai strategi komunikasi BPK menghadapi media serta krisis yang terjadi. Hal ini mengingatkan banyak media yang masih salah menyajikan berita tentang BPK.

Untuk memberikan informasi yang terkini, dihadirkan pembicara yang sesuai dengan kompetensinya. Yaitu pembicara Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Henri Subiakto; Praktisi Kehumasan, Aurello Kaunang; Praktisi Media, Prita Laura; dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufansa Wira Sakti.

"Ini untuk *sharing* pengetahuan dan pengalaman dalam meningkatkan kapasitas kehumasan untuk mendukung tugas masing-masing," papar Bahtiar.

Tak hanya itu, BPK juga memberikan apresiasi kepada Subbagian Humas/Humas TU yang dianggap berprestasi. Yaitu, yang berhasil melakukan kegiatan mengelola pusat informasi dan komunikasi dengan baik.

Wakil Ketua Bahrullah Akbar menambahkan,

acara ini digelar agar ada persepsi yang sama dari seluruh jajaran BPK untuk mengolah dan menyajikan informasi yang disampaikan. "Kita harus menyamakan langkah untuk mencapai tujuan BPK, yaitu bagaimana meningkatkan integritas dan independensi," kata dia.

Apalagi, ujar Bahrullah, saat ini kita telah memasuki era disrupsi yang memangkas batasan jarak dan waktu. Karenanya, penting agar setiap jajaran BPK bisa beradaptasi dengan era yang ada menjawab masalah-masalah yang ada, khususnya di daerah.

"Era disrupsi ini disebut selalu mengganggu dan sudah masuk ke nilai kemasyarakatan 5.0 atau revolusi industri 4.0. Banyak hal yang berubah. Itu pentingnya pertemuan ini," ujar Bahrullah.

Menghadapi tantangan yang ada, lanjut dia, penting agar setiap jajaran BPK dapat menyamakan persepsi dalam membangun komunikasi yang baik. Jangan sampai setiap bagian dari BPK malah kemudian berjalan sendiri-sendiri.

Pada saat yang sama juga BPK telah masuk ke tingkat global. "*Best practice* kita sudah standar internasional. Oleh karena itu, kita harus berpikir ke depan dan global," tegas dia.

Anggota V BPK Isma Yatun yang ikut hadir pada acara menambahkan, tantangan lain bagi humas adalah penerapan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Humas harus mampu mengimplementasikan ketentuan undang-undang tersebut.

"Selain itu, penanganan media juga perlu mendapatkan perhatian bagi humas. Media merupakan salah satu pemangku kepentingan BPK yang akan menyampaikan berita-berita terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK. Humas perlu memiliki strategi yang jelas dan efektif untuk berhubungan dengan media, sehingga BPK mendapatkan respons positif dan proporsional di media," papar dia. ●



■ Sekjen BPK Bahtiar Arif



■ Anggota V BPK, Isma Yatun (tengah)

Mengurangi Tuntutan Hukum Terhadap BPK

Risiko hukum terhadap LHP BPK adalah sebuah konsekuensi dari tindakan akibat hukum dari pihak-pihak yang terkait.

Pengetahuan mengenai hukum menjadi hal yang penting bagi pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini mengingatkan setiap langkah BPK selalu terkait dan bisa mengakibatkan tindakan hukum. Atas dasar ini BPK menggelar *focus group discussion* (FGD) bertema “Mitigasi Risiko Hukum” di Bali, beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar menjelaskan, risiko hukum terhadap LHP BPK adalah sebuah konsekuensi dari tindakan akibat hukum dari pihak-pihak yang terkait. Karenanya, mengetahui dan memahami norma di bidang pemeriksaan dan melaksanakannya secara profesional menjadi hal yang mutlak agar hasil pemeriksaan menjadi akurat.

“Ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk bagaimana memandu pemeriksa agar tidak terkena tuntutan. Ini sebagai upaya preventif atas risiko hukum BPK,” kata dia saat memberikan sambutan.

FGD ini, tambah dia, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap hasil laporan pemeriksaan BPK pada masa sekarang dan mendatang. Apalagi, jumlah gugatan terhadap LHP BPK semakin hari semakin bagus. Baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

“Dari segi kualitas, dulu hanya mungkin dari segi formal, tapi sekarang juga dari segi substansi atau isi. Kalau sudah bicara isi, maka tanggung jawab



institusi yang lebih besar. Karena tidak hanya persoalan administrasi,” kata dia.

Tak hanya itu, area gugatan juga semakin bertambah. Saat ini, gugatan yang diajukan terhadap BPK sudah ke area hukum lain, baik perdata dan pidana. Untuk hukum perdata juga berkembang, bukan hanya ke institusi, tapi juga ke pemeriksanya.

“Bahkan, kuasa hukum dari Ditama Binbangkum juga digugat. Artinya ini jadi tantangan dari tingkat kesadaran hukum masyarakat yang semakin tinggi. Mereka bisa mengajukan tuntutan ke pengadilan dan pengadilan tidak bisa menolak,” papar dia.

FGD kali ini menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali Prof Dr I Gusti Ngurah Wairocana, SH, MH sebagai pembicara. Dia menyampaikan materi mengenai “Mitigasi Risiko Hukum Atas LHP BPK Terkait Gugatan Pihak Ketiga”.

Dalam paparannya, dia menyebutkan ada beberapa alasan gugatan terhadap LHP BPK. Hal ini antara lain, tata cara pemanggilan yang salah dan melanggar asas umum dalam pemeriksaan yang baik. Selanjutnya, tidak menunjukkan surat pemeriksaan dalam pemanggilan. Akan tetapi, langsung melakukan penyitaan berkas serta dokumen.

Alasan lainnya, jelas dia, menyebutkan nama secara pribadi, bukan secara jabatan. Kemudian melakukan audit tanpa melakukan konfirmasi data kepada *auditee*. Catatan terakhir, melakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan. “Catatan-catatan ini saya temukan dari beberapa kasus yang terjadi di Jambi, Jawa Tengah, dan BLBI,” ungkap dia. ●



■ Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar

BPK Pertajam Renstra



■ Ketua BPK, Moermahadi Soerdja Djanegara

BPK mengubah periode renstra untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksana BPK 2019 di kantor pusat BPK, Jakarta, Senin (1/4). Tujuan utama rakor ini adalah mempertajam Rencana Strategis (Renstra) BPK yang sedang berjalan dan Renstra 2020-2024.

Ketua BPK RI Moermahadi Soerdja Djanegara dalam sambutannya mengingatkan, Badan telah memutuskan mempercepat pelaksanaan Renstra BPK 2016-2020 dengan menyelesaikannya pada 2019. Perubahan ini dilakukan guna menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun pemerintah.

"Perubahan ini bertujuan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK, sejalan dengan kebijakan INTOSAI dalam menentukan *audit strategy*," kata Moermahadi dalam acara Rakor Pelaksana 2019 bertajuk "Satukan Energi dalam Sinergi Perumusan Renstra 2020-2024 untuk BPK yang Berprestasi".

Ia berharap hasil identifikasi atas perubahan periode renstra 2016-2020 dapat dikomunikasikan dan disinergikan antarsatker. Sehingga, kebutuhan terkait penyusunan fokus pemeriksaan dan kebutuhan pendukungnya dapat dipenuhi.

Moermahadi mengatakan, melalui Renstra 2020-2024, BPK berharap dapat mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP), meningkatkan publikasi hasil pemeriksaan, menjadikan BPK sebagai pusat regulasi pemeriksaan keuangan negara, serta percepatan

penerapan Sistem Merit dalam pengelolaan SDM, dan mewujudkan independensi anggaran BPK.

"Hal yang tak kalah penting, hasil pemeriksaan atas fokus pemeriksaan diharapkan juga mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat," pungkas Moermahadi.

Anggota V BPK RI Isma Yatun berpesan agar dalam Renstra 2020-2024, tema dan fokus pemeriksaan terus dikembangkan menjadi lebih bersifat lokal yang akan dilakukan masing-masing BPK perwakilan setiap tahunnya.

"Sejak tahun lalu di AKN V telah ada kebijakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan harus lebih spesifik terhadap aspek-aspek tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah yang sejalan dengan kegiatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri," kata Isma.

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif menambahkan, ada banyak hal yang dibahas dalam Rakor Pelaksana 2019. Salah satunya membahas tema dan fokus pemeriksaan, khususnya pada semester dua tahun ini.

Ia mengatakan, akan ada banyak pemeriksaan kinerja serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang dilakukan BPK pada semester dua.

"Banyak dilakukan pemeriksaan kinerja dan PDTT. Mana yang akan dipilih akan ditentukan. Sebelum-sebelumnya kan sudah dicanangkan, maka kita bahas untuk mematangkan pelaksanaan di semester II nanti," kata Bahtiar.

Bahtiar mengatakan, salah satu kegiatan yang spesial dari rakor kali ini adalah pembahasan renstra. Apalagi, pimpinan BPK telah memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan renstra yang sedang berjalan.

"Yang spesifik atau spesial pada rakor 2019 ini adalah kita juga membahas masukan-masukan untuk rencana strategis BPK 2020-2024. Karena sebenarnya renstra harusnya baru selesai tahun 2020, baru nanti ada lagi Renstra 2021-2025. Tapi pimpinan BPK memutuskan supaya periode ini dipercepat 1 tahun agar sama dengan RPJMN. Dengan begitu, renstra periode selanjutnya juga kita menjadi maju, yakni menjadi 2020-2024," kata dia.

Bahtiar mengungkapkan, ada dua topik yang akan diperkuat dalam penyusunan Renstra 2020-2024. Pertama yang berkaitan dengan pemeriksaan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sampai 2030. Kemudian, peningkatan kapasitas atau perbaikan pemeriksaan kinerja. Bahtiar mengatakan, selama ini BPK lebih banyak melakukan pemeriksaan keuangan.

"Namun, kemungkinan dalam Renstra 2020-2024, akan memberikan porsi peningkatan kapasitas dan kualitas pemeriksaan kinerja," ujar dia. ●

BPK Dorong Literasi dengan Bedah Buku

Publik perlu memiliki tingkat literasi yang baik agar bisa berpartisipasi secara aktif dalam mengawal tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara.

Berbagai cara dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan literasi publik terhadap pengelolaan Keuangan negara. Selain rutin melakukan sosialisasi, BPK mencoba mendorong pemahaman masyarakat dengan menggelar acara bedah buku.

Bertempat di Auditorium BPK, Jakarta, Selasa (5/3), BPK menyelenggarakan bedah buku "Menghitung Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi" yang ditulis akuntan senior Theodorus M Tuanakotta. Acara ini dihadiri Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, pejabat struktural BPK, para akademisi dan peserta eksternal lainnya.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dalam sambutannya mengatakan, kegiatan bedah buku diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengertian kerugian negara yang merupakan salah satu kewenangan BPK sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yaitu di antaranya menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara.

Bahrullah mengatakan, partisipasi aktif publik dibutuhkan untuk mengawal tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Namun, publik tentu harus memiliki tingkat pemahaman yang baik atas tata kelola keuangan negara.

BPK, ujar Bahrullah memiliki per-



■ Theodorus M Tuanakotta

pustakaan riset yang bisa dimanfaatkan publik untuk meningkatkan literasi terhadap tata kelola keuangan negara.

"BPK melalui perpustakaan riset mengajak teman-teman sekalian, terutama fakultas ekonomi dan fakultas hukum untuk melihat apa yang terjadi tentang perkembangan transparansi dan akuntabilitas di Indonesia," kata Bahrullah.

Sementara, Theodorus dalam paparannya mengatakan, tugas seorang akuntan forensik adalah menghitung kerugian dalam kasus perdata, pidana, umum, khusus.

"Kita akuntan forensik menghitung apa? Ada macam-macam istilahnya, kadang-kadang kita menghitung kerugian negara dalam arti umum, semua bentuk kerugian. Tapi kadang-kadang juga kita tidak bisa menghitung kerugian itu sendiri, kita juga butuh bantuan dari pihak lain seperti jika kita mencoba menghitung kerugian kebakaran hutan ada ahlinya yang membantu menghitung berapa kerugian yang dihasilkan dari kebakaran hutan tersebut. Jadi kita menghitung kerugian baik itu kerugian keuangan maupun nonkeuangan. Kemudian

kerugian negara," katanya.

Theodorus kemudian mengatakan, dalam diskusinya dengan para ahli hukum seperti para guru besar fakultas hukum, ada yang mengatakan tidak perlu menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi. Namun, tegas dia, kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku tipikor perlu dihitung.

"Dan hal tersebut salah satu yang bisa dikerjakan oleh akuntan forensik," kata dia.

Auditor Utama Investigasi BPK I Nyoman Wara yang hadir sebagai pembahas di acara bedah buku menilai, buku karya Theodorus tersebut merupakan rujukan bagi para praktisi maupun akademisi jika ingin mendalami pengetahuan seputar kerugian negara. Bahkan, menurut dia, buku ini merupakan satu-satunya buku yang secara spesifik membahas tentang menghitung kerugian negara.

"Mungkin ini buku satu-satunya yang menjadi rujukan dalam menghitung kerugian negara, karena saya belum melihat buku yang membahas secara spesifik tentang menghitung kerugian negara," tutur I Nyoman.

Dia mengatakan, buku ini dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama terkait "wajah" baru menghitung kerugian negara. Kedua, menjelaskan peran KPK dalam tindak pidana korupsi. Ketiga, konsep dasar. Sedangkan bagian keempat adalah solusi yang dihadirkan Theodorus sebagai penulis, yakni tentang tata cara menghitung kerugian negara hingga nantinya sampai di pengadilan.

"Salah satu hal yang menarik dari buku ini menurut dia adalah bagaimana akuntan forensik membawa bukti ilmiah menjadi bukti hukum." ●

PENERAPAN PRINSIP PENGUNGKAPAN PENUH (*FULL DISCLOSURE*)

Akun Piutang Pajak pada LKPP TA 2017



OLEH **IMRAN MALIK DJUNUR**
Instansi Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan perlu memperhatikan standar akuntansi dalam pengungkapan informasi terkait piutang perpajakan.

Agar penyajian nilai piutang pajak dapat dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan secara luas, informasi terkait akun piutang pajak dalam LKPP harus memenuhi Prinsip *Full Disclosure*, yaitu prinsip pengungkapan atau penyajian informasi secara lengkap atas aset, kewajiban dan ekuitas baik melalui *face* ataupun catatan atas laporan keuangan. Informasi yang lengkap akan mengindarkan pengguna laporan keuangan dari hal yang menyesatkan dan pengambilan keputusan atau pendapat yang tidak tepat atas kondisi keuangan dan kinerja pemerintah pusat.

LKPP TA 2017 telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor: 64a/LHP/XV/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, termasuk salah satu akun signifikan yaitu Piutang Perpajakan senilai Rp58,6 triliun (17 persen dari nilai Aset Lancar). Namun demikian, berdasarkan hasil penelaahan, masih terdapat informasi penting yang kurang diungkapkan dalam catatan atas LKPP TA 2017 Audited sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Untuk menilai apakah piutang perpajakan telah diungkapkan secara memadai dalam LKPP Tahun 2017, penulis telah menelaah informasi yang diungkapkan dengan menggunakan kriteria Penyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis tentang Piutang.

1. Pengungkapan Kebijakan Akuntansi masih belum memadai.

Kebijakan akuntansi untuk piutang telah dicantumkan sebagai berikut:

“Piutang Jangka Pendek dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah yang timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Perpajakan, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja, Pendapatan yang Masih

Harus Diterima, Piutang BLU, Piutang Lain-lain, Piutang Transfer ke Daerah, dan Piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. LKPP Tahun Anggaran Berjalan menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang jangka pendek dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada CaLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, serta piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, seperti piutang kelebihan transfer ke daerah”.

Pengungkapan di atas bersifat terlalu umum dan terkesan hanya melakukan *copy paste* kalimat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada buletin teknis tentang piutang (Bultek No 16) dinyatakan bahwa piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai dan cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, penilaian dan pengukuran piutang. Berdasarkan bultek tersebut informasi yang juga perlu diungkapkan adalah:

- a. Kriteria penggolongan kualitas piutang pajak menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, macet, dan daluarsa.
- b. Cara perhitungan umur piutang dan penyisihan piutang pajak.

2. Tidak ada pengungkapan Piutang menurut umur yang menunjukkan tingkat kolektibilitas.

Piutang mempunyai sifat khas yaitu makin tua umurnya maka piutang makin sulit ditagih sehingga dengan adanya umur piutang pengguna laporan dapat melakukan analisis dan prediksi terhadap *net realizable value* piutang pajak. Dalam LKPP 2017, telah ada klasifikasi piutang berdasarkan umur piutang yang memungkinkan pengguna LKPP mengetahui kemampuan pemerintah merealisasikan piutang menjadi kas. Namun demikian, pengungkapan umur piutang tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan tingkat kolektibilitas piutang (lancar, kurang lancar, diragukan dan macet) karena tingkat kolektibilitas yang disajikan dalam LKPP 2017 bukan berdasarkan umur piutang (tanggal sejak ditetapkan pertama kali diterbitkan), melainkan berdasarkan kriteria lain yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak (telah diubah dengan PER-07/PJ/2013).

Tidak adanya pengungkapan penggolongan piutang berdasarkan kolektibilitas belum sesuai dengan Buletin Teknis SAP nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua yang menyatakan bahwa Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan antara lain berupa rincian jenis-jenis piutang dan saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.

Adapun rincian piutang berdasarkan umur sebagai berikut:

Kelompok Umur	Nilai Piutang Pajak
kurang dari satu tahun	18.706.051.705.771
1 s.d 2 tahun	8.781.483.386.871
2 s.d 3 tahun	6.229.308.010.554
3 s.d 4 tahun	7.154.993.548.070
4 s.d 5 tahun	6.000.536.411.260
lebih dari 5 tahun	11.749.585.833.953
Jumlah	58.621.958.896.480

Namun rincian piutang pajak menurut tingkat kolektibilitasnya tidak disajikan sehingga tidak dapat diketahui gambaran hubungan antara umur piutang dan tingkat kolektibilitasnya. Pengungkapan piutang menurut umur piutang menjadi tidak efektif karena tujuan pengungkapan yaitu untuk mengetahui tingkat kolektibilitas piutang tidak tercapai.

3. Tidak ada pengungkapan nilai jaminan atau sita jaminan yang terkait dengan piutang (*bold*). Keberadaan nilai jaminan atau sita jaminan berpengaruh terhadap nilai piutang yang dapat direalisasikan sehingga informasi tersebut termasuk hal penting yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tidak adanya pengungkapan nilai jaminan tidak sesuai dengan Buletin Teknis SAP nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua yang menyatakan bahwa Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan antara lain berupa jaminan atau sita jaminan jika ada.

4. Tidak ada penjelasan yang rinci terkait penyebab terjadinya piutang daluarsa senilai Rp32,7 triliun dari saldo awal piutang perpajakan TA 2017 sebesar Rp105,6 triliun.

Penjelasan terkait piutang pajak daluarsa diungkapkan dalam LKPP TA 2017 sebagai berikut:

Penyebab daluarsa ini harus dijelaskan karena menyangkut hilangnya hak tagih negara yang sangat besar, yaitu 31 persen dari nilai awal piutang. Jika penyebab terjadinya daluarsa piutang tidak diatasi, maka akan ada kemungkinan daluarsa terjadi lagi di tahun anggaran 2018.

Untuk saldo akhir piutang perpajakan TA 2017 sebesar Rp58,6 triliun, tidak dapat diketahui nilai piutang yang daluarsa karena tidak diungkapkan dalam laporan keuangan. Akibatnya, pengguna laporan keuangan tidak memperoleh gambaran secara konsisten tentang piutang daluarsa.

Sebagai informasi, gambaran nilai piutang daluarsa dapat dilihat dari nilai penyisihan atas piutang pajak yang dikategorikan macet sebagaimana dalam lampiran 8.C, yaitu sebesar Rp24,8 triliun. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa piutang yang macet seluruhnya dikarenakan hak penagihannya sudah daluarsa (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-02/PJ/2012). Jika ada Rp24,8 triliun yang daluarsa dalam piutang sebesar Rp58,6 triliun, maka ada 42,3 persen bagian piutang perpajakan yang tidak dapat ditagih. Porsi ini tentu sangat besar sehingga seharusnya diungkapkan secara memadai dalam LKPP TA 2017.

5. Saldo piutang pajak bruto pada DJP mengalami penurunan sebesar Rp47 triliun yang disebabkan adanya Piutang Pajak daluarsa (tidak lagi

Rincian Piutang Perpajakan menurut organisasi adalah sebagai berikut.

Uraian	(dalam ribuan rupiah)	
	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Direktorat Jenderal Pajak:		
Nilai Bruto	54.160.090.238	101.774.202.460
Penyisihan	(27.725.482.667)	(70.022.982.880)
Nilai Bersih	26.434.607.571	31.751.219.580
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:		
Nilai Bruto	4.461.868.658	3.882.174.635
Penyisihan	(3.324.042.373)	(2.718.921.736)
Nilai Bersih	1.137.826.285	1.163.252.899
Piutang Perpajakan (Bruto)	58.621.958.896	105.656.377.095
Total Penyisihan	(31.049.525.040)	(72.741.904.616)
Piutang Perpajakan (Bersih)	27.572.433.856	32.914.472.479



mempunyai hak tagih) sebesar Rp32 triliun dan tidak dicatat lagi pada Neraca LKPP TA 2017. Terhadap piutang tersebut dilakukan pencatatan secara ekstrakomptabel dan tetap dikelola sampai dengan dilakukannya penghapusan tagihan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan.

Nilai Rp32 triliun tersebut telah dirinci dalam lampiran namun tidak diberikan judul "Piutang Ekstrakomptabel", hanya diberi judul "Piutang Pajak Macet, Piutang Pajak Daluarsa". Pemindahan ke catatan ekstrakomptabel belum menghapus piutang pajak secara formil-yuridis sehingga harus tetap dipelihara catatannya hingga dibuatkan KMK Penghapusan Piutang Pajak. Oleh karena itu, pemberian judul akan menegaskan bahwa lampiran tersebut adalah catatan ekstrakomptabel yang harus dilampirkan dalam laporan keuangan dan diadministrasikan dengan baik dokumen rinciannya hingga terbitnya KMK Penghapusan Piutang Pajak.

6. Judul lampiran 8D yaitu Piutang Pajak Macet, Piutang Pajak Daluarsa per 31 Desember 2017 kurang tepat.

Nilai piutang pajak daluarsa per 31 Desember 2017 yang dimaksud dalam lampiran 8D sebesar Rp32.754.196.844.000 justru merujuk kepada nilai piutang pajak daluarsa yang dipindahkan dari Neraca per 31 Desember 2017 ke catatan ekstrakomptabel (sebagaimana dinyatakan dalam poin D.2.13. Piutang Perpajakan). Dengan demikian, dalam piutang perpajakan per 31 Desember 2017 sebesar Rp58,6 sudah tidak terdapat lagi piutang daluarsa sebesar Rp32,7 triliun.

Pengungkapan informasi atas suatu akun menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi tingkat pemahaman dan keyakinan pengguna laporan keuangan. Dalam pemeriksaan BPK, kualitas pengungkapan informasi juga menjadi salah satu kriteria pemberian opini sebagaimana disebutkan

dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Pasal 16 dan penjelasannya) yang menyatakan bahwa "laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, yaitu pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan kriteria: (a) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (b) Kecukupan Pengungkapan (*adequate disclosure*), (c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (d) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern."

Simpulan

1. Pengungkapan informasi atas piutang belum memadai karena:
 - a. kebijakan/prosedur akuntansi yang digunakan dalam penyajian piutang,
 - b. perincian piutang berdasarkan umur piutang dan tingkat kolektibilitas piutang,
 - c. nilai jaminan atau sita jaminan terkait piutang,
 - d. tidak mengungkapkan secara memadai penyebab terjadinya daluarsa penagihan,
2. Terdapat ketidakjelasan pengungkapan informasi pada lampiran LKPP TA 2017.

Saran Perbaikan

1. Kementerian Keuangan mengungkapkan informasi lebih rinci terkait piutang perpajakan sebagaimana yang disebutkan dalam SAP dan Butek Nomor 16 serta memperbaiki kesalahan pengungkapan informasi dalam lampiran.
2. Kementerian Keuangan perlu memperhatikan standar akuntansi dalam pengungkapan informasi terkait piutang perpajakan. ●

Saldo piutang Pajak bruto pada Direktorat Jenderal Pajak mengalami penurunan sebesar Rp47.034.418.199 atau sebesar 44,51 persen. Penyebab penurunan terbesar dikarenakan adanya Piutang Pajak daluarsa sebesar Rp32.754.196.844.939 yang dicatat pada Neraca TA 2017, karena Pemerintah sudah tidak mempunyai hak untuk menagih atas Piutang Pajak daluarsa tersebut. Atas Piutang Pajak daluarsa yang tidak dilakukan lagi pada Neraca dilakukan pencatatan secara ekstrakomptabel dan tetap dikelola sampai dengan dilakukannya penghapusan tagihan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan.

>>>

FGD antara BPK RI dengan Bank Indonesia dihadiri Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, dan Anggota II BPK Agus Joko Pramono di Ruang Rapat Konsultasi Gedung BPK, 5 Maret 2019.



>>>

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menerima LK *UnAudited* pada *Entry Meeting* Pemeriksaan LKPP Tahun 2018 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani di Auditorium BPK RI, 27 Maret 2019.



>>>

Courtesy call Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar dengan perwakilan GIZ di Ruang Rapat Waka Lt. 17, 20 Maret 2019.





<<<

Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna dalam Kuliah Umum Peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara di Universitas Andalas, Padang, 19 Maret 2019.



<<<

Anggota II BPK Agus Joko Pramono berziarah ke makam-makam Sunan di Jawa Tengah, 1 Maret 2019.



<<<

Anggota III BPK Achsanul Qosasi menghadiri undangan Kemensos dalam acara sosialisasi PKH di Lumajang, Jawa Timur, 11 Maret 2019.



Anggota IV BPK Rizal Djali dalam acara Seminar Nasional “Prospek Penerimaan Negara dari Mineral, Batubara, dan Migas di Tahun Politik” di Universitas Indonesia, Depok, 1 April 2019.



Anggota V BPK Isma Yatun berbincang dengan beberapa siswa dalam Program Indonesia Pintar yang diselenggarakan di Lombok Tengah, 11 Maret 2019.



Anggota VI BPK Harry Azhar Azis menjadi salah satu pembicara pada Sosialisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Buleleng Bali, 9 April 2019.



SERTIFIKAT

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Kutipan dari Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor: 21/E/KPT/2018, Tanggal 9 Juli 2018
Tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2018

Nama Jurnal Ilmiah
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara
E-ISSN: 2549-452X
Penerbit: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

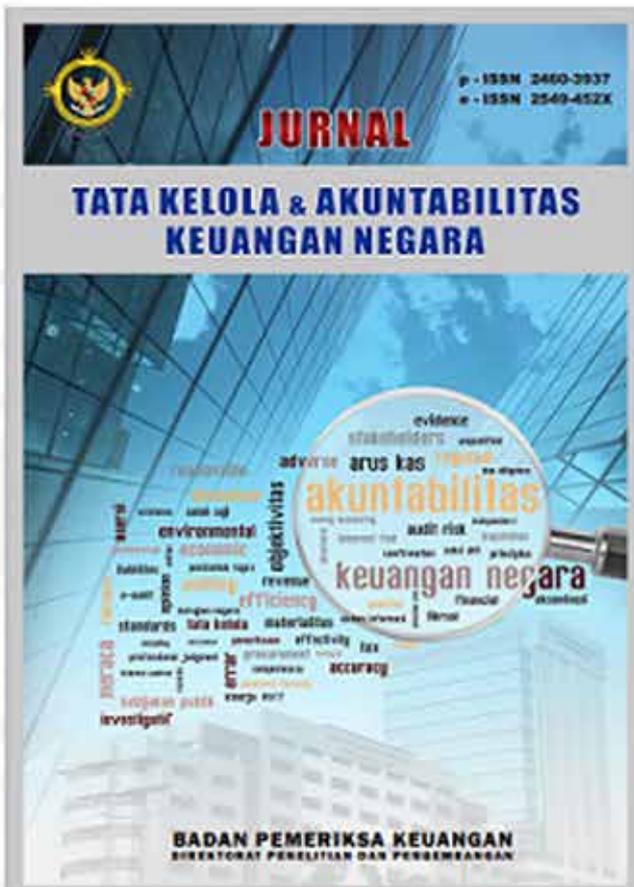
TERAKREDITASI PERINGKAT 2

Akreditasi berlaku selama 5 (lima) tahun, yaitu
Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016 sampai Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020

Jakarta, 9 Juli 2018
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan



Dr. Muhammad Dimiyati
NIP. 195912171984021001





Sukseskan!

**PEMILU
2019**

AMAN DAMAI BEBAS BERPENDAPAT
TANPA DAMAI
ADIL **SARA** TANPA **DAMAI**
SEJUK TRANSPARAN **HOAX** SUAP
BEBAS BERPENDAPAT ANTI **TABEL**
JUJUR **TANPA SARA**
ANTI HOAX TANPA ADIL
SUAP TRANSPARAN AMAN

